

MINYAK BUMI

dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia
1950-1960an

Saat ini Indonesia sedang melakukan negosiasi ulang atas kasus-kasus pengelolaan hasil tambang yang kurang berpihak pada sebesar-besar kepentingan rakyat Indonesia. Menghadapi kasus tersebut, Pemerintah Indonesia harus belajar pada sejarah pengelolaan tambang minyak bumi yang dikaji pada buku ini. Pertambangan minyak bumi adalah unit usaha warisan kolonial Belanda, yang pengelolaan awalnya murni untuk kepentingan pemerintah kolonial beserta perusahaan-perusahaan asing yang mengerjakannya secara teknis.

Namun, ketika Indonesia merdeka dan telah menjadi bangsa yang berdaulat, merasa berkepentingan mengambil alih pengelolaan tambang-tambang minyak yang masih dikuasai perusahaan asing tersebut. Perjuangan untuk hal ini bukanlah perjuangan yang ringan karena di belakang perusahaan-perusahaan minyak asing berdiri pula kekuatan negara asing. Dengan satu keyakinan dan dengan semangat nasionalisme yang membara, upaya untuk mengelola pertambangan minyak bumi secara mandiri akhirnya berhasil. Keberhasilan tersebut ditandai dengan lahirnya perusahaan minyak nasional yang saat ini dikenal dengan nama PT. Pertamina.

- Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak.
Rektor Universitas Airlangga

PURNAWAN BASUNDORO. Staf pengajar pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Intensif melakukan penelitian dengan tema sejarah perkotaan dan sejarah perekonomian. Sebagian besar karyanya sudah diterbitkan dalam bentuk buku dan jurnal. Selain mengajar dan penelitian, sejak tahun 2015 mendapat tugas tambahan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga.



Airlangga University Press

Kampus C Universitas Airlangga
Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247
Fax. (031) 5992248
E-mail: aup.unair@gmail.com

ISBN 978-602-6606-59-4



9 786026 606594

MINYAK BUMI

dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an

Purnawan Basundoro

MINYAK BUMI

dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia
1950-1960an

Purnawan Basundoro

Diterbitkan atas kerja sama Airlangga University Press dan PIPS UNAIR

MINYAK BUMI

dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia
1950-1960an

Dr. Purnawan Basundoro, M.Hum

Buku ini diterbitkan atas kerja sama Airlangga University Press dan PIPS UNAIR

Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950–1960an

Purnawan Basundoro

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Basundoro, P.

Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan
Ekonomi Indonesia 1950–1960an/Purnawan
Basundoro. – Cet.1 –Surabaya: Airlangga
University Press, 2017.

141 hlm.: 23 cm.

ISBN 978-602-6606-59-4

1.Minyak Bumi

I. Judul

333.823

Penerbit:

Airlangga University Press

Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248

E-mail: aup.unair@gmail.com

ANGGOTA IKAPI: 001/JTI/95

ANGGOTA APPTI: 001/KTA/APPTI/X/2012

AUP 300/58.698/08.17 (0.04)

Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS) UNAIR

Kampus C Unair, Gedung Kahuripan Lt. 2, Ruang 203, Mulyorejo Surabaya 60115

Telp. (031) 59204244 Fax. (031) 5920532 E-mail: adm@pips.unair.ac.id

Dicetak oleh:

Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP)

(RK 431/10.17/AUP-A4E)

Cetakan pertama — 2017

Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari
Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

Saya menyambut baik terbitnya buku *Minyak Bumi dan Dinamika Politik di Indonesia 1950-1960an*, yang ditulis oleh Purnawan Basundoro. Keberadaan buku ini memiliki dua makna, pertama, merupakan ujud nyata kinerja seorang dosen yang tugas utamanya adalah mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Ilmu pengetahuan akan berkembang dengan baik jika setiap pengampu, bekerja secara maksimal melakukan penelitian dan meramunya menjadi naskah-naskah akademik yang dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Kedua, buku ini merupakan sumbangan penting dari seorang akademisi untuk bangsa Indonesia dalam bidang sejarah pertambangan minyak. Banyak hal yang telah terjadi pada masa lampau bisa menjadi inspirasi dan landasan penyelenggaraan pemerintahan pada masa kini dan mendatang.

Terbitnya buku ini merupakan momentum yang tepat, karena bangsa Indonesia sedang menghadapi persoalan pengelolaan pertambangan yang dilakukan perusahaan tambang asing. Saat ini Indonesia sedang melakukan negosiasi ulang atas kasus-kasus pengelolaan hasil tambang yang kurang berpihak pada sebesar-besar kepentingan rakyat Indonesia. Menghadapi kasus tersebut, Pemerintah Indonesia harus belajar pada sejarah pengelolaan tambang minyak bumi yang dikaji pada buku ini. Pertambangan minyak bumi adalah unit usaha warisan kolonial Belanda, yang pengelolaan awalnya murni untuk kepentingan pemerintah kolonial beserta perusahaan-perusahaan asing yang mengerjakannya secara teknis. Namun, ketika Indonesia merdeka dan telah menjadi bangsa yang berdaulat, merasa berkepentingan untuk mengambil alih pengelolaan tambang-tambang minyak yang masih dikuasai oleh perusahaan asing. Perjuangan untuk hal ini bukanlah perjuangan

ringan karena di belakang perusahaan-perusahaan minyak berdiri kekuatan negara asing. Dengan satu keyakinan dan dengan semangat nasionalisme yang membara, upaya untuk mengelola pertambangan minyak bumi secara mandiri akhirnya berhasil. Keberhasilan tersebut ditandai dengan lahirnya perusahaan minyak nasional yang saat ini dikenal dengan nama PT. Pertamina.

Belajar pada sejarah pertambangan minyak bumi, upaya untuk mendudukan kegiatan pertambangan yang dikelola perusahaan asing pada proporsi yang tepat akan berhasil jika para pemangku kepentingan dan para negosiator bekerja semata-mata demi kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat Indonesia. Nasionalisme harus menjadi landasan kuat dalam menghadapi setiap konflik kepentingan pengelolaan usaha pertambangan. Insya Allah jika semua tindakan dilakukan atas nama bangsa, pasti akan mendapat dukungan maksimal dari seluruh elemen. Hanya dengan cara inilah semua upaya untuk memaksimalkan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat akan berhasil dengan baik. Terakhir, saya secara pribadi mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, semoga menjadi inspirasi bagi dosen-dosen lain di Universitas Airlangga untuk melakukan hal serupa.

Surabaya, Oktober 2017

Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CA.,CMA.

Prakata

Minyak bumi adalah bahan tambang yang kedudukannya sangat krusial karena dibutuhkan oleh hampir semua manusia di dunia namun memiliki cadangan terbatas. Sejak ditemukan pertama kali pada abad ke-19, dan berangsur-angsur menjadi bahan bakar utama, hampir semua mobilitas horizontal manusia ditentukan oleh keberadaan minyak bumi. Namun, karena tidak semua wilayah memiliki kandungan minyak bumi, maka kedudukan benda ini menjadi sangat strategis dan paling diburu. Antar negara tidak jarang berkonflik karena memperebutkan minyak bumi. Peperangan yang terjadi di beberapa negara salah satunya juga karena hal tersebut.

Minyak bumi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan langsung dengan kolonialisme Belanda. Awal penemuannya adalah ketidaksengajaan yang dialami oleh seorang pemilik perkebunan tembakau di Langkat Sumatera Utara, Aelko Zijlker, pada 1883. Pada saat memeriksa perkebunannya, secara tidak sengaja ia menemukan lumpur hitam yang dari baunya diketahui sebagai minyak bumi. Dengan naluri bisnis yang dimilikinya, Zijlker kemudian mendirikan perusahaan pengeboran minyak dengan modal yang berasal dari Negeri Belanda. Berawal dari situasi seperti itu, pertambangan minyak di Indonesia berkembang pesat, dijalankan dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing. Ketika Indonesia merdeka, upaya untuk mengambil alih kendali pengelolaan minyak bumi dari tangan perusahaan asing bukanlah hal mudah, dan membutuhkan perjuangan keras. Momentum tersebut baru terwujud pada dasawarsa kedua periode Indonesia merdeka.

Selama periode 1950-1960an upaya untuk mengambil alih pengelolaan minyak bumi dari tangan perusahaan-perusahaan asing telah memunculkan dinamika yang khas dalam situasi negara yang baru saja merdeka. Di sana ada semangat nasionalisme yang menyala-nyala, namun belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola pertambangan minyak, baik kemampuan teknik maupun kemampuan manajerial. Hanya dengan berbekal tekad, orang Surabaya mengatakan *bondo nekat* sering disingkat *bonek*, pada akhirnya pengelolaan pertambangan minyak bisa dikuasai oleh bangsa Indonesia.

Sejarah pertambangan minyak Indonesia tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Pada pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah maupun yang diajarkan di perguruan tinggi, sejarah pertambangan minyak Indonesia tidak dibahas. Minyak di Indonesia hanya dikenal dari fungsi praktis, fungsi politis, dan fungsi ekonomisnya. Pengetahuan historis atas benda tersebut kadang dikesampingkan. Beberapa buku kajian sejarah pertambangan minyak memang pernah diterbitkan, misalnya yang ditulis oleh A.G. Bartlett dkk (1986), serta buku-buku yang diterbitkan oleh Pertamina (1982, 1985, 1990). Ada lagi buku yang membahas dunia perminyakan di Indonesia dalam konteks biografi mantan Direktur Utama PT. Pertamina, Ibnu Sutowo. Buku tersebut ditulis oleh Mara Karma (2001), dan oleh Ramadhan KH (2008). Namun, buku-buku tersebut tampaknya juga kurang dikenal luas oleh masyarakat, bahkan saat ini semua buku tersebut sudah jarang ditemukan. Sebagai upaya untuk terus memupuk ingatan tentang perjuangan bangsa dalam mengambil alih pengelolaan pertambangan minyak dari tangan asing ke tangan bangsa Indonesia serta bagaimana liku-liku pengelolaan benda yang sangat berharga tersebut, saya berinisiatif menulis dan menerbitkan buku ini.

Sejarah perminyakan pada buku ini ditulis dalam bingkai kondisi politik dan ekonomi Indonesia tahun 1950-1960an. Periode tersebut dalam sejarah Indonesia sering dianggap sebagai periode eksperimen

kebangsaan Indonesia, terutama pada aspek politik dan ekonomi. Praktik pemerintahan dijalankan dengan berganti-ganti pemimpin pemerintahan, sementara kondisi ekonomi Indonesia memperlihatkan wajah yang kurang baik, atau lebih tepatnya suram. Pertalian kondisi ekonomi dan politik yang demikian yang saya gunakan untuk melihat kondisi perminyakan di Indonesia pada periode dimaksud. Dengan demikian, buku ini bukan sekedar menjelaskan perkembangan pertambangan minyak bumi dari waktu ke waktu, namun berusaha menggambarkan posisi politik dan ekonomi.

Dengan terbitnya buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut terlibat untuk mewujudkannya. Ucapan terima kasih yang pertama saya tujukan kepada Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CA.,CMA., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menulis buku ini, sekaligus saya juga menghaturkan terima kasih atas kesediaannya menulis kata pengantar. Kepada Guru Abadi saya, Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A., saya menghaturkan terima kasih tak terhingga, karena berkat beliau buku ini bisa diwujudkan. Kepada beliau buku ini saya persembahkan sebagai wujud kebanggaan atas bimbingan dan persahabatannya selama ini. Hanya Allah jualah yang akan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Airlangga University Press yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Semoga buku kecil ini bisa menambah wawasan para pembaca sekalian.

Surabaya, Oktober 2017

Purnawan Basundoro

Daftar Isi

Prakata.....	vii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xv
Bab 1	
Minyak Bumi dan Kajian Sejarah Ekonomi Indonesia	1
Kedudukan Minyak Bumi dalam Kajian Sejarah	1
Minyak Bumi pada Masa Hindia Belanda	8
Bab 2	
Kondisi Politik dan Perekonomian Indonesia pada	
Awal Kemerdekaan	21
Kabinet Parlementer dan Kebijakan Ekonomi	
1950-1957.....	24
Orientasi Politik dan Perbedaan Orientasi	
Ekonomi.....	27
Kebijakan Modal Asing.....	33
Politik “ <i>Jalan Lain</i> ”, Nasionalisasi Perusahaan	
Belanda	38
Kemelut Politik dan Krisis Ekonomi 1957-1965	43
Bab 3	
Membangun Kembali Sumber Devisa	49
Minyak Bumi di Awal Kemerdekaan 1945-1949	52
<i>Let Alone Agreement</i> : 1948-1951	57
Minyak Bumi Di Parlemen: Mosi Muhammad Hasan.....	61
Embrio Perusahaan Minyak Nasional	67
Harapan Pemerintah Pada Sektor Perminyakan.....	72

Bab 4**Produksi Minyak Bumi dan Kebijakan Pemerintah 77**

Produksi dan Distribusi Minyak Bumi Indonesia	78
Kebijakan Pemerintah.....	92
Pengendalian dan Pengawasan Harga	93
Pembatalan Hak-hak Pertambangan	95
UU Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1960.....	96
Kewajiban Prorata.....	100
<i>Tokyo Heads of Agreement</i>	101

Bab 5**Minyak Bumi di Pasaran Dalam Negeri 107**

Aspek Produksi dan Distribusi.....	108
Permintaan Minyak di Pasaran Dalam Negeri	116
Pengendalian Harga Minyak	119
Tuntutan Politik: Nasionalisasi Untuk Kemandirian Bangsa	124

Bab 6**Penutup: Masa Lalu untuk Hari Ini dan Masa Depan 129**

Daftar Pustaka	133
Indeks	139

Daftar Tabel

Tabel 1. Produksi minyak mentah, hasil kilang, dan ekspor	19
Tabel 2. Komposisi produksi minyak bumi di Indonesia 1925-1963.....	80
Tabel 3. Perubahan indeks harga	85
Tabel 4. Besaran keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak	89
Tabel 5. Perincian minyak mentah dan hasil olahan menurut perusahaan.....	109
Tabel 6. Penjualan minyak bumi di dalam negeri	117
Tabel 7. Indeks harga eceran 19 kebutuhan pokok dan indeks harga minyak yang ditetapkan pemerintah untuk Jakarta	121
Tabel 8. Penetapan harga minyak oleh pemerintah di beberapa kota	124

Daftar Gambar

Gambar 1.	Pompa bensin milik Shell di Glodok Batavia	14
Gambar 2.	Pompa bensin milik <i>Bataafse Petroleum Maatschappij</i> (BPM) di <i>Celebesplein</i> Gubeng Surabaya pada 1930an ...	16
Gambar 3.	Pompa bensin milik perusahaan minyak <i>Shell</i> di Bangli Bali 1929	17
Gambar 4.	Kilang minyak milik <i>Bataafsche Petroleum Maatschappij</i> (BPM) di Wonokromo Surabaya.....	18
Gambar 5.	Sutan Syahrir, Perdana Menteri pertama pemerintahan parlementer Indonesia	23
Gambar 6.	Corat-coret pada gedung-gedung sebagai ekspresi kemarahan rakyat Indonesia kepada Belanda	41
Gambar 7.	Serangan pasukan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941	50
Gambar 8.	Pabrik parafin milik <i>Shell</i> di Cepu	54
Gambar 9.	Perumahan dinas karyawan <i>Shell</i> di Plaju Sumatera Selatan	55
Gambar 10.	Mr. Teuku Mohammad Hasan.....	63
Gambar 11.	Kilang Minyak Cepu 1930an	70
Gambar 12.	Menara pengeboran minyak di Cepu 1926	79
Gambar 13.	Kantor <i>Bataafse Petroleum Maatschappij</i> (BPM) di Jakarta	81
Gambar 14.	Kawasan pertambangan minyak di Balikpapan 1918	82
Gambar 15.	Pembangunan depot minyak milik <i>Shell/BPM</i> di Pelabuhan Hollandia (saat ini Jayapura) Papua 1955.....	87
Gambar 16.	Kereta pengangkut minyak di Balikpapan 1920an	89
Gambar 17.	Kilang minyak milik BPM di Balikpapan.....	91
Gambar 18.	Para pekerja perusahaan tambang minyak sedang memasang pipa-pipa di kawasan Plaju, Palembang	105
Gambar 19.	Perumahan dinas staf <i>Shell</i> di Kebayoran Jakarta 1955.	113

KEDUDUKAN MINYAK BUMI DALAM KAJIAN SEJARAH

Perkembangan historiografi Indonesia dalam aspek-aspek sosial, politik, dan kebudayaan merupakan fokus utama kajian para sejarawan pada masa-masa awal,¹ sedangkan sejarah perekonomian Indonesia sampai beberapa waktu yang lalu belum banyak dijadikan sebagai objek studi oleh para sejarawan Indonesia atau sejarawan asing yang ahli tentang sejarah Indonesia. F.J.E. Tan seorang ahli sejarah ekonomi mengemukakan bahwa studi sejarah perekonomian Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya masih berada pada tahap awal.² Kalaulah sudah ada kajian yang dilakukan, kebanyakan difokuskan pada perekonomian Indonesia masa kolonial. Hal ini dimungkinkan, terutama sejak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah ekonomi telah ditemukan dan tertata dengan baik.³ Sementara, kecenderungan yang ada adalah studi sejarah perekonomian Indonesia lebih banyak dilakukan para sarjana dengan latar belakang pendidikan ilmu ekonomi dibanding oleh sejarawan

¹ Perkembangan Historiografi Indonesia telah diungkap dalam William H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

² F.J.E Tan, "Aspect of an Indonesian Economic Historiography," dalam Soedjatmoko, et al., ed, *An Introduction to Indonesian Historiography*, (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 398.

³ Bambang Purwanto, "Pertanian Rakyat Sumber Ekonomi Penting yang Sering Dilupakan dalam Penulisan Sejarah," dalam *HISTMA*, No. 2/1/1992, hlm. 42.

yang dididik dengan dasar-dasar ilmu sejarah.⁴ Dari latar belakang pendidikan ini akan menghasilkan dua model sejarawan. Pertama, disebut sejarawan ekonomi modern yang dikenal dengan nama sejarawan kiliometrik atau ekonometrik, berasal dari ahli ekonomi dengan latar pendidikan ilmu ekonomi yang menggunakan teori dan metodologi sejarah untuk bisa memahami sejarah ekonomi.⁵ Kedua, sejarawan ekonomi konvensional, berasal dari didikan jurusan ilmu sejarah yang memaksakan diri mempelajari dasar-dasar ilmu ekonomi untuk memahami sejarah ekonomi Indonesia agar dapat memahaminya secara utuh. Sejarawan ekonomi konvensional lebih banyak menggarap data-data kualitatif karena ia memandang aktivitas ekonomi masih tetap merupakan aktivitas manusia, sehingga sejarah ekonomi tidak lepas dari latar belakang sosial pengalaman manusia. Motif, sikap, dan nilai tidak bisa dipisahkan dari sejarah ekonomi.⁶ Seperti telah disebutkan, di samping kajian sejarah ekonomi lebih banyak dilakukan oleh sejarawan model pertama, fokus kajian mereka pun lebih banyak difokuskan pada perekonomian Indonesia masa kolonial. Periode awal kemerdekaan sampai menjelang tragedi nasional 30 September 1965 belum banyak diteliti dan diungkap.

Periode awal kemerdekaan sampai tahun 1965, merupakan periode yang menarik untuk kajian sejarah, baik dimensi ekonomi maupun dimensi politik, karena pada masa-masa itu Indonesia merupakan sebuah negara baru yang mulai mencoba mandiri, sehingga mulai mencoba beberapa sistem politik dan sistem ekonomi. Salah satu sistem politik yang diterapkan dan dijalankan adalah sistem liberal yang ternyata kemudian menyeret bangsa Indonesia ke dalam berbagai kesulitan, baik kesulitan ekonomi maupun politik.

⁴ Sejarawan adalah orang yang khusus dididik untuk menjadi orang yang ahli dalam rekonstruksi sejarah dengan kaidah-kaidah, metode, dan metodologi tertentu yang spesifik. Masalah sejarawan perekonomian dan sejarawan murni diungkap oleh Thee Kian Wie, "Perekonomian Indonesia di Zaman Kolonial," kata pengantar dalam Anne Booth, et al., *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm ix-xvii.

⁵ William J.O. Malley, dalam *ibid.*, hlm. 34.

⁶ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm 88.

Dalam rangka menciptakan opini internasional yang menguntungkan, terutama untuk menunjukkan kepada negara-negara Sekutu bahwa Indonesia bukan fasis dan bukan pula sekadar boneka Jepang maka kerangka politik dan konstitusional diubah. Pada bulan November 1945 muncullah rezim demokrasi liberal dengan suatu kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen serta didukung oleh sistem banyak partai.⁷

Dengan sistem yang baru diterapkan tersebut ternyata masa-masa sulit terus mengikuti perjalanan bangsa Indonesia. Kesulitan-kesulitan akibat peperangan bertambah berat akibat perencanaan dan penataan ekonomi yang kurang tepat serta gejolak politik yang terus terjadi susul-menyusul. Era demokrasi liberal Indonesia menghadapi masalah berat dalam ekonomi dan politik yang telah sampai pada tingkat krisis. Ekonomi dikacaukan oleh tingkat inflasi yang tinggi, cadangan devisa yang terkuras, dan defisit anggaran belanja pemerintah.⁸ Pertumbuhan ekonomi yang cukup merangsang dengan laju pertumbuhan 6,9 persen dalam periode 1952-1958 turun drastis menjadi 1,9 persen dalam tahun 1960.⁹ Sementara defisit anggaran belanja pemerintah dibiayai terutama dengan pencetakan uang baru, sehingga tingkat harga tidak henti-hentinya membubung. Laju inflasi tahunan selama periode 1955-1960 diukur dengan indeks biaya hidup di Jakarta rata-rata 23,5 persen.¹⁰

Dalam sektor politik Indonesia direpotkan dengan berbagai pemberontakan di daerah-daerah yang menjurus ke arah

⁷ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 29. Baca juga Fachry Ali, "Dinamika Sosial Politik Indonesia Tahun Lima Puluhan," kata pengantar pada *Kemelut Demokrasi Liberal, Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. xviii.

⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

⁹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: PAU-FE UGM, 1987), hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

separatisme.¹¹ Hal inilah yang kemudian mendorong Presiden Sukarno mengubah konsep politiknya dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin yang dibayangkan sebagai suatu jenis rezim korporatis yang didasarkan pada asas-asas tradisional gotong-royong dan musyawarah mufakat. Konsep ekonomipun diganti dengan konsep ekonomi terpimpin. Perubahan yang dilakukan ternyata tetap tidak dapat mengubah keadaan, baik perekonomian maupun situasi politik Indonesia¹² karena isu kebijakan yang seharusnya bermanfaat untuk kepentingan nasional, seperti pembangunan ekonomi, sering dikesampingkan demi hal lain yang menjanjikan keuntungan jangka pendek bagi satu atau semua kelompok yang memperebutkan kekuasaan, sehingga masalah-masalah ekonomi dipandang sebagai hal yang kurang penting dibanding dengan kampanye militer dan perebutan pengaruh yang memberikan kesempatan yang besar kepada Presiden Sukarno dan Angkatan Darat untuk memperkuat kekuasaan politik mereka. Selain itu, guna menjaga keseimbangan kekuatan, pemerintah selalu menunda keputusan-keputusan ekonomi dan politik yang dapat merugikan unsur-unsur yang ada dalam pemerintah.¹³ Seperti dikatakan Jamie Mackie, perimbangan politik Indonesia dijaga dengan mengorbankan keseimbangan ekonomi.¹⁴

Usaha ke arah perbaikan ekonomi memang dicoba dengan dihasilkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1961),¹⁵ tetapi karena struktur pendukungnya yang sangat labil, akhirnya

¹¹ Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah dapat dilihat misalnya dalam R.Z. Lereissa, *PRRI-Permesta Strategi Membangun Tanpa Komunis*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991), Barbara Sillar Harvey, *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984), dan Kahar Muzakkar dari *Tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989).

¹² Herbest Feith dan Lence Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 62-72.

¹³ Mas'ood, *op. cit.*, hlm. 47.

¹⁴ Jamie Mackie, *Problems of Indonesia Inflation*, (Ithaca: Cornell Modern Ekonomi Indonesia Project, 1967), hlm. 10.

¹⁵ M. Dawam Rahardjo, *Pragmatisme dan Utopia, Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 61.

usaha tersebut gagal untuk memperbaiki keadaan, dan semakin memperparah perekonomian Indonesia.¹⁶

Minyak bumi, salah satu sektor yang sangat vital baik bagi perekonomian maupun bagi kehidupan manusia, saat itupun tidak luput dari kesulitan karena ikut terseret ke dalam gelombang kekacauan perekonomian Indonesia. Sejak dilakukan eksplorasi yang pertama di Indonesia pada tahun 1883,¹⁷ minyak bumi kemudian mempunyai peranan yang sangat vital bagi kebutuhan energi di Indonesia. Walaupun untuk sebagian negara-negara di dunia masalah energi bukan hanya masalah minyak, tetapi secara rata-rata untuk dunia, minyak merupakan sumber energi yang terbesar dan terpenting.

Kedudukan kritis minyak dalam keseimbangan energi dunia serta ketidakmerataan distribusi, membuat minyak tampil sebagai satu jenis komoditas yang baik secara ekonomis, politis, bahkan strategis menjadi sedemikian pentingnya. Politik menentukan harga dan kendali pengadaannya seringkali menjadi sumber ketegangan internasional dan sumber kekacauan ekonomi yang begitu eksplosif. Minyak telah menjadi sesuatu yang mempunyai satu hubungan fungsional dengan berbagai isu penting dalam tertib hubungan manusia.¹⁸ Minyak berkaitan secara sistematis dengan sejumlah masalah penting seperti derajat pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan perdagangan, dan orientasi politik, sehingga segala persoalan yang bersangkutan dengan minyak pasti memiliki satu prioritas tinggi dalam ekonomi, perdagangan, dan kebijakan politik.

Sejak ditemukan, minyak telah berperan penting, baik untuk pemenuhan akan kebutuhan energi serta untuk pemasukan devisa

¹⁶Albert Widjaya, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 61.

¹⁷"Minyak Bumi", dalam *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Jilid 2*, (Jakarta: Cipta Adi Sarana Pustaka, 1992), hlm. 186.

¹⁸Qystein Noreng, *Minyak dalam Politik, Upaya Mencapai Konsensus Internasional*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 33.

bagi Negara. Sejak Indonesia merdeka, penguasaan produksi dan distribusi minyak bumi belum sepenuhnya berada di tangan bangsa Indonesia. Proses penambangan serta pengolahan bahan tambang tersebut sampai siap pakai masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minyak asing yang sudah menguasai pertambangan minyak sejak masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial, minyak bumi Indonesia menempati posisi yang penting dalam perdagangan internasional, dan produksinya menempati urutan kelima dalam produksi dunia. Namun, sejak Indonesia merdeka sedikit demi sedikit produksi minyaknya mengalami kemerosotan, yang akhirnya menempatkan produksinya pada urutan kesepuluh dunia pada 1950-1960an. Pada periode tersebut bahkan sempat memicu kelangkaan minyak di pasaran dalam negeri yang mengarah pada krisis minyak bumi.

Spesifikasi minyak bumi adalah hampir semua daerah memerlukannya, terutama sejak ditemukan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak bumi, namun tidak semua daerah memiliki sumber-sumber minyak bumi sehingga untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan sistem distribusi yang baik yang dapat menghantarkan minyak bumi sampai kepada konsumen secara merata. Persoalan-persoalan yang timbul yang berkaitan dengan minyak bumi tidak hanya menjadi persoalan daerah tetapi menjadi persoalan nasional. Sekecil apa pun persoalan yang menyangkut minyak bumi biasanya serta-merta akan berdampak secara nasional dan dirasakan merata di seluruh negeri. Kebijakan yang harus diambil untuk penanganan dan pengelolaan minyak bumi juga tidak bisa diambil secara parsial namun harus secara menyeluruh.

Kesulitan minyak di dalam negeri pascakemerdekaan samai tahun 1960an tidak bisa dilepaskan dengan pengelolaan minyak bumi pada waktu itu, serta kebijakan politik pemerintah terkait hal tersebut. Seperti diketahui khalayak, kemerdekaan Indonesia secara politik tidak serta-merta diikuti kemerdekaan ekonomi. Kendali perekonomian Indonesia awal kemerdekaan masih banyak dilakukan

oleh Belanda, dibuktikan dengan masih banyaknya sektor-sektor utama pemenuhan hajat ekonomi orang banyak masih dikuasai banyak perusahaan Belanda dan perusahaan asing lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada sektor perminyakan. Pengelolaan minyak bumi di Indonesia pada awal kemerdekaan sepenuhnya berada di tangan perusahaan-perusahaan pertambangan minyak asing, sehingga pemenuhan kebutuhan minyak bumi juga sepenuhnya tergantung pada perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka merupakan perusahaan swasta yang memegang monopoli, mulai dari produksi, distribusi, serta pemasarannya. Upaya melepaskan diri dari ketergantungan pada perusahaan-perusahaan minyak asing bukan hal yang mudah, mengingat bangsa Indonesia pada waktu itu belum memiliki keahlian serta infrastruktur yang cukup memadai untuk mengelola usaha pertambangan minyak bumi.

Tarik ulur antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan tambang minyak asing yang beroperasi di negeri ini terus terjadi selama periode 1950an-1960an, terutama menyangkut hak dan kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut dalam pengelolaan pertambangan minyak. Pemerintah Indonesia menghendaki agar perusahaan-perusahaan minyak asing tunduk kepada kemauan pemerintah untuk menjalankan regulasi baru. Regulasi yang sarat dengan kepentingan nasional dan dilandasi semangat nasionalisme yang menyala-nyala dalam pandangan perusahaan-perusahaan minyak dianggap merugikan mereka. Banyak kepentingan perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia akan terhalangi jika regulasi baru tersebut dijalankan. Mereka umumnya menghendaki agar regulasi lama yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda tetap dijalankan karena lebih menguntungkan mereka.

Ekonomi perminyakan di Indonesia pada awalnya merupakan entitas kolonial murni, yang dicirikan dengan pengerukan kekayaan secara total dan dibawa keluar dari daerah koloni untuk kepentingan pemerintah kolonial secara total. Dengan demikian, upaya menerapkan regulasi baru kepada perusahaan-perusahaan

minyak asing yang beroperasi di Indonesia pada waktu itu merupakan tindakan dekolonisasi ekonomi perminyakan Indonesia.

MINYAK BUMI PADA MASA HINDIA BELANDA

Kondisi perminyakan di Indonesia tahun 1950an, tidak bisa dipisahkan dengan latar belakang sejarah keberadaan komoditi tersebut di Indonesia pada masa kolonial. Lahirnya aktivitas pengelolaan minyak bumi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan kolonialisme Belanda di negeri ini. Dengan kata lain, lahirnya ekonomi perminyakan di Indonesia dibidani oleh kolonialisme Belanda, yang merupakan bagian mata rantai pencarian minyak bumi secara besar-besaran sejak bahan bakar fosil tersebut ditemukan pertama kali di Amerika Serikat.

Pengeboran minyak bumi secara komersial dilakukan pada tahun 1859 di Titusville Pennsylvania oleh Kolonel Edwin Drake. Pada tahun pertama produksi minyak di Amerika Serikat, harga jualnya mencapai US \$20 per barel, namun harga itu segera merosot karena produksi yang berlebihan.¹⁹ Setelah itu, muncul tujuh perusahaan raksasa yang dinamakan “Putri Tujuh” atau *The Seven Sisters* yang menguasai perdagangan minyak bumi di pasaran dunia. Melalui sistem kartel mereka saling bekerja sama, menentukan harga minyak bumi di dunia secara sepihak. Selama dua dekade berikutnya pencarian minyak meluas ke seluruh dunia.

Pencarian minyak secara komersial di Hindia Belanda dilakukan pertama kali oleh Jan Reerink tahun 1871. Ia melakukan pengeboran pertama kali di Cibodas, Jawa Barat, dengan membuat empat buah sumur, tetapi tidak satu pun yang memberikan harapan komersial sampai modal yang digunakan habis. Keberhasilan penemuan selanjutnya adalah sesuatu yang tidak disengaja oleh Aelko Zijlker tahun 1883. Ia adalah seorang pemilik ladang tembakau. Ketika

¹⁹Herman Johannes, “Indonesia di Sekitar Masalah Energi”, dalam *PRISMA* No. 11 (Nopember) 1979, hlm. 8-14.

2

Kondisi Politik dan Perekonomian Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 berhasil meruntuhkan kekuasaan kolonial, tetapi tidak serta merta melahirkan masyarakat nasional yang baru. Dari segi politik dapat dibenarkan bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah berhasil menyusun format politik yang baru dan mengenyahkan sistem lama yaitu sistem kolonial. Beberapa kerangka politik dan konstitusional besar guna mencapai tujuan seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin bangsa telah berhasil diciptakan. Selama tahun-tahun pergolakan perang kemerdekaan, republik baru ini berjuang melawan usaha-usaha Belanda yang didukung oleh kekuatan Sekutu untuk memperoleh tanah jajahannya, Indonesia diperintah pertama kali oleh kabinet presidensil dibantu oleh suatu komite penasehat.¹ Kendati demikian, Indonesia belum memiliki badan politik khusus yang bisa menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Dari perspektif politik memang Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai sebuah negara, tetapi dari perspektif ekonomi bangsa Indonesia belum berhasil menyusun sistem perekonomian yang nasionalistis dan mandiri. Kekuatan modal asing sebagai warisan

¹Sehubungan dengan keadaan yang gawat akibat serangan pihak Belanda maka dengan berbagai pertimbangan diperlukan sebuah badan yang ikut bertanggung jawab akan nasib bangsa dan negara Indonesia. Untuk memenuhi maksud tersebut maka dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Fungsi komite tersebut pada awalnya adalah sebagai penasehat presiden.

kolonial telah menjejakkan kakinya begitu lama di Indonesia. Begitu juga dengan sistem sosial dan politik yang mengiringinya, merupakan kekuasaan yang secara berlanjut masih berada di luar jangkauan penguasaan bangsa Indonesia. Kenyataan tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari negara baru yang bangkit dari keporakporandaan sisa penjajahan serta peperangan yang berkepanjangan. Sumber daya manusia yang sangat minim dalam hal penguasaan teknologi dan manajerial untuk menangani sumber daya material yang melimpah juga merupakan kendala.

Bukan berarti bahwa kesadaran tentang kepincangan struktural serta usaha menghapuskannya tidak ada. Kesadaran tersebut ada bahkan jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ketika gagasan yang mengacu kepada isi “Indonesia merdeka” sedang berkembang. Tahun 1932 Sukarno dalam artikelnya “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi”, menolak ide yang hanya menekankan perlunya demokrasi politik sebab hal ini tidak dengan sendirinya menjamin hak-hak ekonomi rakyat.²

Secara tegas pembangunan ekonomi taraf pertama setelah kemerdekaan adalah mengubah struktur perekonomian, dari struktur perekonomian yang dipandang sebagai peninggalan kolonial menjadi struktur nasional dengan pemerintah dan sektor perusahaan negara yang memegang kendali perekonomian.³ Landasan filosofi yang dibangun melalui sistem ini adalah perekonomian yang didasarkan pada sistem kekeluargaan dengan semangat gotong royong.

Upaya untuk mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional bukanlah usaha yang mudah. Hal tersebut disebabkan karena bangsa Indonesia dihadapkan pada beberapa kendala. Pertama, jumlah orang Indonesia yang sudah terlatih dan berpengalaman terlalu sedikit untuk dapat melaksanakan kebijakan

² Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Djilid I*, (Jakarta: Panitia Penerbit DBR, 1963), hlm. 172.

³ Mohammad Sadli, “Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Sejarah”, dalam *Teknologi dan Strategi Militer*, 11 Maret 1988, hlm. 50-51.

guna mendorong perkembangan suatu kelas pengusaha golongan Bumiputra dan mempercepat perbaikan ekonomi mereka. Kedua, perusahaan-perusahaan milik asing dan orang Cina mendominasi sektor-sektor ekonomi modern, sedangkan orang Indonesia tidak memiliki modal dan keterampilan berwiraswasta yang diperlukan untuk bersaing dalam sektor ekonomi.⁴ Kendala itu juga disertai dengan kesulitan-kesulitan dalam sektor politik. Dalam rangka menciptakan opini internasional yang menguntungkan terutama untuk menunjukkan kepada negara-negara Sekutu bahwa Indonesia bukan fasis dan bukan sekadar boneka Jepang seperti tuduhan Belanda, setelah melalui pergulatan panjang, kerangka politik dan konstitusional diubah. Pada bulan November 1945 muncullah sebuah pemerintah liberal dengan kabinet parlementer yang dipimpin oleh perdana menteri, serta didukung oleh sistem multipartai. Sebuah masa-masa sulit yang panjang pun segera dimulai karena model pemerintahan tersebut tidak lama kemudian diikuti dengan masa-



Gambar 5.

Sutan Syahrir, Perdana Menteri pertama pemerintahan parlementer Indonesia.

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Syahrir, 2017)

⁴Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 4-5.

masa yang justru mengancam eksistensi kemerdekaan Indonesia sebab tidak lama kemudian Belanda berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia.

Tentu saja usaha Belanda tersebut mendapat reaksi yang keras dari masyarakat Indonesia dengan berusaha melawan setiap tindakan mereka yang akan menjajah kembali. Masa-masa yang seharusnya digunakan untuk menata diri setelah lama larut dalam penjajahan ternyata harus digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda. Untuk menyelesaikan masalah tersebut bangsa Indonesia juga mengalami konflik internal antara kelompok yang mendukung peperangan dan mereka yang menyukai cara-cara diplomatik dalam mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda.

Indonesia terperangkap konflik sehingga tidak mampu memobilisasi sumber daya ekonomi karena sektor-sektor utama dikuasai oleh Belanda kembali. Pemerintahan baru tidak efektif dan dijangkiti ketidakstabilan. Terbukti, dalam kenyataannya terdapat lima pemerintahan dalam waktu yang relatif pendek,⁵ dari November 1945 sampai tahun 1949, ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia.⁶

KABINET PARLEMENTER DAN KEBIJAKAN EKONOMI 1950-1957⁷

Pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada akhir 1949, ditandai dengan konsolidasi ke arah penyatuan. Searah dengan konsolidasi politik yang menitikberatkan pada unsur-unsur nasional, tujuan di bidang ekonomi adalah untuk mengubah ekonomi kolonial.

⁵Untuk masalah ini secara sekilas diuraikan dalam Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm. 151-196.

⁶Pengakuan kedaulatan tersebut masih dengan syarat bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan di kemudian hari.

⁷Periode tersebut kadang-kadang dinamakan periode "Demokrasi Liberal", yang secara konstitusional berakhir pada tahun 1959 ketika presiden Sukarno mengeluarkan sebuah dekret untuk memberlakukan sistem "Demokrasi Terpimpin" dengan memanipulasi UUD 1945. Sebenarnya secara *de facto* "Demokrasi Liberal" telah berlangsung sejak November 1945 ketika sistem presidensial diganti dengan sistem parlementer serta dihidupkannya kembali sistem banyak partai politik.

Pandangan ekonomi yang dominan dari para pemimpin politik Indonesia dapat disebut sebagai “ekonomi nasional” atau sebutan retorikanya “nasionalisasi ekonomi”.⁸ Saat itu sebagian besar bidang produksi, distribusi, jasa-jasa, asuransi, perbankan, dan sebagainya masih dikuasai Belanda.

Secara esensial ekonomi nasional yang dimaksudkan oleh para pemimpin itu mencakup tiga dimensi. Pertama, suatu perekonomian yang beragam dan stabil yang berarti ditiadakkannya ketergantungan yang besar kepada ekspor bahan mentah. Kedua, suatu perekonomian yang sudah berkembang dan makmur, dan ketiga suatu perekonomian menjadi satu bagian yang penting dari pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan Bumiputra atau negara Indonesia, yang berarti pengalihan penguasaan dan pengelolaan atas kegiatan-kegiatan ekonomi dari tangan orang-orang Barat atau Cina ke tangan orang-orang Indonesia.⁹ Butir yang ketiga tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kendali perekonomian Indonesia pada masa itu masih dipegang oleh perusahaan-perusahaan Belanda, serta bisnis eceran yang dipegang oleh orang-orang Cina.

Akan tetapi, ketika dihadapkan pada masalah prioritas, para pemimpin pada periode 1950-1957 memutuskan untuk tidak melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan dimensi ketiga jika hal itu akan bertentangan dengan tujuan dari dua aspek yang pertama. Pertimbangan mendasar yang berhubungan dengan hal tersebut adalah terbatasnya sumber daya manusia Bumiputra yang menguasai aspek manajerial untuk pengelolaan sumber-sumber perekonomian yang ada. Di samping itu, kekuasaan ekonomi dari kabinet-kabinet awal era tahun 1950-an dipegang oleh “kelompok moderat” atau orang-orang yang lebih mengutamakan kebijakan ekonomi melalui pendekatan pragmatis.

⁸Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 21.

⁹*Ibid.*, hlm 22.

Kabinet pertama setelah pengakuan kedaulatan, dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, seorang ekonom profesional lulusan negeri Belanda yang benar-benar seorang moderat. Kabinet tersebut mempunyai kedudukan yang unik dan kuat karena berdasarkan pasal 74 ayat 1 UUD RIS kabinet ini tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.¹⁰ Hal tersebut dapat dijelaskan karena tuntutan stabilitas serta perhatian yang perlu diarahkan untuk pembangunan, serta belum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pemilihan umum. Kabinet Hatta dapat dikatakan sebagai *zaken* kabinet yang bukan merupakan wakil-wakil dari partai melainkan para profesional yang bermaksud memecahkan persoalan atas dasar kepentingan bangsa, bukan kepentingan partai.

Menurut John Sutter, Kabinet Hatta digolongkan sebagai “periode Masyumi”. Sutter memandang bahwa ada dua periode kabinet pada tahun lima puluhan. Periode pertama adalah ketika Indonesia berada di bawah pemerintahan empat kabinet pertama yang dimulai bulan Desember 1949, ketika Hatta diangkat menjadi perdana menteri sampai bulan Juni 1953, ketika Wilopo meletakkan kembali mandatnya sebagai perdana menteri. Periode tersebut menurut Sutter disebutnya sebagai “periode Masyumi”, walaupun dalam kenyataannya Hatta dan Wilopo bukan dari partai Masyumi. Sebutan Sutter didasarkan bahwa pada periode itu banyak didominasi pandangan-pandangan Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu duduk sebagai menteri keuangan dan berasal dari Partai Masyumi. Periode kedua adalah periode setelah kejatuhan kabinet Wilopo yang disebutnya sebagai “Periode Partai Nasional Indonesia (PNI)”, yang didominasi dengan pandangan-pandangan politikus ultrasionalis serta sosialis.¹¹ Pandangan Sutter jelas sekali mengacu pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh setiap kabinet.

¹⁰Noer, *op.cit.*, hlm. 199.

¹¹John Orval Sutter, “Indonesianisasi: A Historical Survey of The Role of Politics in The Institutions of Changing Economy From The Second World War to The Eve of General Elections (1940-1955),” PhD Dissertation Faculty of The Graduate School of Cornell University, 1959.

Kendati konsentrasi utama dari Kabinet Hatta adalah penyatuan politis wilayah-wilayah Indonesia ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), namun perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi cukup besar. Tindakan paling penting yang dilakukan kabinet tersebut adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang secara serempak, dan pemotongan uang yang dikenal dengan istilah “Gunting Sjafruddin”, disusul devaluasi Maret 1950.¹² Pemotongan uang tersebut melibatkan pengguntingan menjadi separoh atas semua uang kertas keluaran *De Javasche Bank* yang bernilai nominal lebih dari 2,50 gulden Indonesia,¹³ dan pengurangan seluruh deposito bank yang bernilai di atas 400 *gulden* menjadi separohnya. Sebagai ganti rugi akibat tindakan pengurangan deposito, pemegang deposito diberi obligasi jangka panjang pemerintah.

Orientasi Politik dan Perbedaan Orientasi Ekonomi

Demokrasi parlementer yang berjalan di Indonesia tidak dengan sendirinya berjalan mulus dan lancar. Dipandang sebagai sebuah faktor yang memberikan dampak yang luas, maka satu bagian dari sistem ini menimbulkan persoalan amat serius yaitu mengenai kedudukan dan otoritas parlemen di dalamnya yang kemudian dipandang “lain” oleh kelompok militer.

Sistem politik liberal ternyata telah memberikan posisi dan kewenangan yang begitu besar kepada parlemen. Parlemen diberi hak untuk menjatuhkan kabinet dengan suara mayoritas, sementara partai-partai politik yang duduk di dalamnya, dalam praktiknya

¹² Bruce Glassburner, “Economic Policy Making in Indonesia, 1950-1957,” dalam Bruce Glassburner, ed, *The Economy of Indonesia, Selected Reading*, (Ithaca: Cornell University Press, 1971), hlm. 88. Lihat juga Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 563.

¹³ Sampai tanggal 22 Mei 1951, saat *De Javasche Bank* dinasionalisasikan dan diubah menjadi Bank Indonesia, mata uang Indonesia bernama gulden.

menjadi pemegang kekuasaan politik dan secara umum bertindak sebagai pembuat kebijakan menurut mekanisme yang ada.¹⁴

Sementara itu, sisi lain dari sistem politik liberal yang nantinya akan menimbulkan kesulitan sekaligus sebagai tantangan paling berat, hanya menempatkan Presiden Sukarno dan tentara, dua kekuatan yang telah mengambil peran menentukan sistem revolusi kemerdekaan, tanpa suatu peran politik riil yang cukup. Presiden, meskipun memiliki kedudukan yang kuat, tetapi tidak diberi kekuasaan pemerintahan. Militer bukan saja tidak mempunyai peranan politik yang cukup, bahkan kedudukannya telah ditentukan tidak lebih sebagai alat pemerintah yang sedang berkuasa. Presiden serta militer dengan demikian hanya memiliki peran yang terbatas dan merupakan kekuatan-kekuatan politik yang sifatnya ekstra parlementer.

Satu ciri lain dari sistem demokrasi parlementer yang juga semakin menambah ketidakpuasan Presiden Sukarno dan militer adalah bahwa periode ini sangat sarat dengan ketidakstabilan politik atau lebih tepatnya ketidakstabilan pemerintahan. Persaingan partai-partai sangat tajam, bukan saja karena persaingan untuk berebut posisi-posisi strategis dalam kabinet, namun juga disebabkan oleh pertentangan ideologi.¹⁵

Sebagai kekuatan yang bertindak menjadi pihak yang bertanggung jawab paling berat bagi terselenggaranya keamanan nasional, militer menjadi tidak begitu menyukai sistem politik yang menyimpan potensi besar untuk meletupkan situasi konflik. Akhirnya, kekecewaan militer tentu berangkat pula dari kondisi ketika kekuatan yang tadinya bertindak dan merasa sebagai pejuang telah mengambil peran-peran menentukan dalam perjuangan mengenyahkan kekuasaan kolonial, namun sekarang dihadapkan pada tatanan politik yang tidak sedikit

¹⁴Lihat Achmad Sanusi, *Perkembangan Sistem Pemerintahan RI, 1945-1958*, (Bandung: Penerbit Universitas, 1958), hlm. 38.

¹⁵Herbert Feith & Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. xlv.

3

Membangun Kembali Sumber Devisa

Industri perminyakan di Indonesia pada mulanya merupakan murni industri kolonial. Artinya, industri tersebut dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan asing yang keberadaannya di Indonesia berada dalam konteks kolonialisme Belanda. Hubungan politis antara perusahaan-perusahaan dimaksud dengan pemerintah kolonial Belanda tentu saja membawa konsekuensi bagi perusahaan-perusahaan minyak. Secara politis eksistensi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sangat rentan, terutama pada masa peralihan. Tahun 1942 Belanda harus menghadapi serangan Jepang yang menandai keterlibatan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Peristiwa tersebut berdampak besar terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan minyak serta industri perminyakan itu sendiri di Indonesia.

Perang Dunia Kedua tidak saja membawa bencana bagi ribuan manusia di berbagai belahan dunia, tetapi juga merupakan bencana bagi industri perminyakan di Indonesia. Serangan Jepang atas Pearl Harbor menandai mulainya perang Pasifik. Dengan diserangnya Pearl Harbor kemudian Malaya, sudah dapat dipastikan Hindia Belanda akan menjadi sasaran penyerbuan selanjutnya. Belanda mengakui bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan Jepang. Oleh karena itu, ia merencanakan akan menghancurkan semua fasilitas minyak terlebih dahulu sebelum jatuh ke tangan musuh.



Gambar 7. Serangan pasukan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941. (Sumber: <http://media.iwm.org.uk>, 2017)

Pelaksanaan penghancuran itu dilakukan oleh Angkatan Darat Hindia Belanda bekerja sama dengan perusahaan minyak, tetapi karena pelaksanaannya dilakukan dengan tergesa-gesa, pekerjaannya menjadi tidak sempurna. Di Sumatera Selatan, kilang *Stanvac* di Sungai Gerong hampir seluruhnya hancur, tetapi kilang *Shell* di Plaju yang terdapat di seberang sungai boleh dikatakan tidak disentuh sama sekali.¹ Sementara itu di berbagai kota, Belanda meledakkan tangki-tangki tempat penyimpanan minyak. Sebagian fasilitas minyak utama di Kalimantan dan Jawa dapat dikatakan berhasil dihancurkan.

Jepang secara kilat melancarkan serbuannya terhadap lapangan-lapangan minyak, dan akhir Maret 1942 Jepang sepenuhnya menguasai lapangan-lapangan minyak tersebut. Kedudukan terpenting sehubungan dengan minyak adalah Palembang karena keberadaan tambang Sungai Gerong dan Plaju. Kedudukan Palembang menjadi lebih penting karena hanya daerah itu satu-

¹ Mestika Zed, *Kepialangan, Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*, Disertasi Doktor Vrije Universiteit te Amsterdam, (Amsterdam 1991), hlm. 195.

satunya penghasil minyak untuk kapal terbang (*Avgas*) di Hindia Belanda yang diperlukan Jepang, yang sebenarnya juga dibutuhkan dalam operasi kapal terbang *American, British, Dutch, and Australia* (ABDA) di Indonesia.²

Pada awal penjajahan Jepang, instalasi pengolahan minyak yang dapat berfungsi secara utuh hanya Plaju, sedangkan daerah lain walaupun berfungsi, maksimal hanya 30% saja. Dalam tahun 1943 rehabilitasi instalasi minyak di Hindia Belanda oleh Jepang masih terus dilakukan, bahkan secara ekstensif. Kecuali membangun kembali kilang-kilang minyak yang lama, Jepang juga memperluas ladang minyak yang baru. Perlengkapan-perengkapan baru juga didatangkan dari negerinya. Selama tahun 1943 diperkirakan 72% dari total kebutuhan minyak Jepang diimpor dari Hindia Belanda.³

Angka-angka produksi dari kilang-kilang tersebut selama perang dan di bawah pengelolaan Jepang tidak diketahui dengan pasti. Jepang lebih membutuhkan minyak dalam upaya mendukung usahanya dalam peperangan, yaitu untuk menjalankan mesin-mesin perangnya. Sangat sedikit minyak yang dikomersialkan pada masa itu.⁴

Diperkirakan Jepang mengeruk 3.250.000 metrik ton di tahun 1942, 6.500.000 metrik ton di tahun 1943, 3.750.000 metrik ton di tahun 1944, dan tahun 1945 hanya mengeruk sekitar 850.000 metrik ton. Jumlah tersebut sudah termasuk produksi dari sumur-sumur Inggris di Kalimantan Utara. Menjelang akhir peperangan, terjadi penurunan produksi yang sangat drastis, karena hanya daerah Sumatera Selatan saja yang dapat memproduksi minyak

²ABDA, *American, British, Dutch, and Australia*, adalah satuan komando Sekutu yang bertanggung jawab untuk melindungi atau menahan serangan Jepang di Kawasan "Malaise Bariere," yaitu mulai dari daerah Utara Sumatera di bagian Barat sampai ke Irian, dan Australia Utara di Bagian Timur. Didirikan di Surabaya tanggal 28 Desember 1941. *Ibid.*, hlm. 209.

³*Ibid.*, hlm. 211.

⁴Ooi Jin Bee, *The Petroleum Resources of Indonesia*, (Kualalumpur: Oxford University Press, 1982), hlm. 7

secara maksimal, sedangkan daerah-daerah lain rata-rata hancur oleh politik bumi hangus.

Pada Agustus 1945, Indonesia merdeka. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia bukan saja kemerdekaan dalam hak politik tapi juga hak untuk mengelola sumber kekayaan alam. Sekalipun pemimpin pemerintah revolusioner pada awalnya bersedia menyerahkan beberapa hak ekonominya kepada Belanda,⁵ namun pemberian konsensi kepada pihak asing masih mendapat tantangan dari rakyat. Kemerdekaan yang baru beberapa bulan ternyata mendapat gangguan serius sejak kedatangan kembali Belanda ke Indonesia. Peperangan segera meletus karena ketidakrelaan rakyat Indonesia atas kedatangan tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Bersamaan dengan kedatangan pasukan Belanda, perusahaan-perusahaan minyak asing juga kembali ke Indonesia untuk memulai kembali aktivitas perusahaannya yang sempat terhenti pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut tentu saja menimbulkan berbagai persoalan di tengah-tengah sentimen anti Belanda yang meningkat.

MINYAK BUMI DI AWAL KEMERDEKAAN 1945-1949

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, pasukan Sekutu *Allied Forces Netherland East Indies* (AFNEI) menyerukan agar Jepang memelihara "*status quo*" di Indonesia. Dalam perundingan dengan AFNEI, tentara Jepang diperintahkan untuk tetap mempertahankan kekuasaan atas lapangan minyak dan fasilitas lainnya sampai Belanda sebagai pemilik semula mengambil alih kekuasaan. Di lain pihak, para pejuang Indonesia tetap bertekad untuk menguasai semua instalasi produksi dan kilang-kilang minyak atau meledakkannya daripada dikuasai kembali oleh Belanda. Ketika terjadi kevakuman kekuasaan sesaat setelah Jepang kalah dan

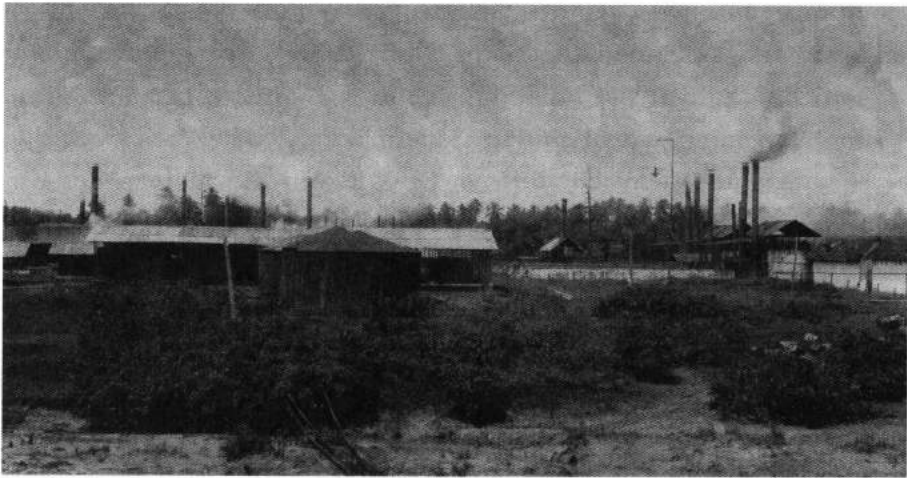
⁵Lihat naskah perjanjian Linggarjati.

sebelum kedatangan tentara Sekutu, perkebunan, pabrik-pabrik, lapangan minyak, dan kilang-kilang telah diambil alih dan dinyatakan sebagai hak rakyat. Di lapangan-lapangan minyak bermunculan perusahaan yang diorganisir dan dioperasikan oleh kelompok pekerja bersenjata yang menyebut dirinya Laskar Minyak. Mereka adalah bekas pekerja lapangan dan pekerja kilang minyak di zaman kolonial dan masa pendudukan Jepang.

Menjelang tahun 1946, sumber minyak di daerah Sumatera Selatan sudah berada di tangan bangsa Indonesia, tetapi dalam praktiknya sebagian besar jatuh ke dalam banyak tangan, atau kelompok-kelompok laskar yang menguasai secara langsung, baik lokasi maupun distribusi setempat. Laskar minyak di Sumatera Selatan membentuk perusahaan yang diberi nama Perusahaan Minyak Indonesia (PERMIRI). Laskar minyak ternyata tidak hanya di Sumatera Selatan, karena di Sumatera Utara juga muncul laskar minyak yang kemudian membentuk Perusahaan Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI), sedangkan di Jawa Tengah berdiri Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN).⁶

Pihak perusahaan minyak asing juga mulai datang kembali ke lokasi tambang mereka. Dengan kembalinya beberapa perusahaan ini, maka semakin banyak kelompok yang berkepentingan atas tambang-tambang minyak tersebut, sehingga atas prakarsa pihak Sekutu sejak tanggal 15 Juli 1946 diadakan perundingan tentang status industri minyak. Di Sumatera Selatan misalnya Sekutu berhasil mempertemukan beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu otoritas Pemerintah Republik Indonesia di Palembang dan “Persatuan Pegawai Minjak” (PPM) di satu pihak, serta perusahaan minyak *Shell*, atau dalam hal ini juga *Bataafse Petroleum Maatschappij* (BPM) yang menguasai Plaju sebelumnya, dan *Nederlandsche Koninklijke Petroleum Maatschappij* (NKPM) yang menguasai Sungai Gerong di lain pihak.

⁶ Masalah Laskar Minyak lihat Humas Pertamina, *40 Tahun Perkembangan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1945-1985*, (Jakarta: Humas Pertamina, 1985), hlm. 16-25.



Gambar 8. Pabrik parafin milik *Shell* di Cepu. (Sumber: <http://colonialarchitecture.nl>, 2017)

Pertemuan ini menelorkan beberapa kesepakatan mengenai sistem penjatahan (kuota) produksi minyak antara pemilik modal (pihak perusahaan) dan Republik (PPM) sebagai pelaksana.⁷

Sementara itu, karena penguasaan sumur-sumur minyak di pedalaman tidak termasuk ke dalam agenda pertandingan, kecuali hanya berkenaan dengan instalasi minyak Plaju dan Sungai Gerong, pihak Indonesia di Palembang mengeksplorasi sendiri di bawah otoritas PERMIRI. Sejak bulan Agustus 1946, dua bulan menjelang Sekutu meninggalkan Sumatera Selatan, instalasi minyak Plaju dan Sungai Gerong telah dijaga oleh pasukan Sekutu, menggantikan tentara Jepang yang telah dipulangkan secara bertahap. Sumur-sumur minyak di pedalaman dijaga oleh “Batalyon Minyak” Tentara Republik Indonesia (TRI).

Kedatangan kembali tentara Belanda dengan membonceng kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia, salah satu sasaran terpentingnya adalah ladang-ladang minyak. Instalasi penyulingan minyak Plaju dan Sungai Gerong sejak awal kedatangan bala tentara

⁷ Mestika, *op.cit.*, hlm. 289.

Belanda, yaitu sejak bulan November 1946, langsung ditempatkan dalam penguasaan mereka. Kedatangan tentara Belanda di Indonesia diikuti pula dengan datangnya semua perusahaan minyak asing ke Indonesia. Pada awal penguasaannya, kedua instalasi yang masih berfungsi di antara instalasi yang lain, hanya difungsikan sebagai markas tentara Belanda, karena sejak bulan Januari 1947 kedua instalasi itu ditinggalkan oleh buruh-buruh minyak.

Kedatangan kembali tentara Belanda di Indonesia memunculkan sebuah “era yang aneh”, karena pada saat yang bersamaan terdapat dua pemerintahan, Republik Indonesia dan Belanda yang diwakili oleh *Netherlands-Indies Civil Administration* (NICA). Keduanya diakui sebagai pemerintah yang berkuasa dan menjalin kerja sama dalam kecurigaan dan dengan penuh prasangka. Dalam keadaan seperti itu urusan pemerintah sangat tidak menentu. Suatu kesepakatan kedua belah pihak baru sampai pada tingkat penyelesaian dan saling pengertian dalam soal pengaturan sektor pelayanan umum (*public service*).



Gambar 9. Perumahan dinas karyawan *Shell* di Plaju Sumatera Selatan. (Sumber: <http://colonialarchitecture.nl>, 2017)

Sejak perusahaan minyak asing mulai kembali ke sumur-sumur mereka untuk mengadakan perbaikan, BPM berhasil meneruskan produksi di Tarakan, dan Kalimantan. Kilang minyak di Balikpapan juga diaktifkan kembali. Pada bulan Oktober 1946 kilang Plaju dikembalikan ke BPM. Pertengahan tahun 1947, baik kilang *Stanvac* di Sungai Gerong maupun kilang *Shell* di Plaju telah siap menerima minyak mentah, tetapi saat itu belum banyak hasil pengeboran yang siap untuk diolah, sehingga sampai tahun 1948 perusahaan-perusahaan itu belum dapat menunjukkan suatu produksi yang berarti. *Caltex* adalah perusahaan yang datang paling akhir. Pada saat perusahaan tersebut memperoleh kembali tambang minyaknya, sebagian besar fasilitas yang ditinggalkan sudah menjadi besi tua.

Perusahaan-perusahaan minyak yang datang kembali ke lokasi-lokasi pertambangan dan menemukan lokasi pertambangan mereka telah rusak, baik karena pernah ditinggal maupun karena dibumihanguskan, tentu saja memerlukan dana besar untuk rekonstruksi. Peralatan-peralatan tambang harus diganti yang baru agar bisa beroperasi kembali. Rumah-rumah karyawan yang rusak juga harus diperbaiki. Untuk keperluan pendanaan yang besar, perusahaan-perusahaan minyak minta kepada otoritas Belanda agar membuat kebijakan tertentu untuk mempermudah transfer pembiayaan dari perusahaan induk di luar negeri. Belanda kemudian mengeluarkan kebijakan yang disebut *Let Alone Agreement*. Inti kebijakan *Let Alone* adalah memberikan pengecualian, bahwa dana rekonstruksi tersebut bebas dari pengawasan penukaran uang asing. Persetujuan itu dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah pengakuan kedaulatan.

Pada masa rekonstruksi tersebut, hasil produksi minyak di berbagai tambang minyak di Indonesia sangat tidak menentu. Namun demikian hasilnya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang ada, produksi minyak pada periode tersebut naik dari 302.000 metrik ton tahun 1946, menjadi 1.113.000 metrik ton pada tahun 1947, dan 4.326.000 metrik ton di tahun 1948.

4

Produksi Minyak Bumi dan Kebijakan Pemerintah

Minyak bumi adalah bahan tambang yang memerlukan pengelolaan khusus sebelum bisa digunakan. Pengelolaan minyak bumi memiliki mata rantai yang panjang. Diawali dengan pencarian sumber-sumber minyak bumi yang berada jauh di bawah permukaan tanah, setelah diketemukan maka proses selanjutnya adalah melakukan penambangan dengan cara mengebor permukaan tanah sampai kedalaman tertentu di mana sumber minyak bumi berada. Setelah mata bor mencapai sumber minyak, maka proses selanjutnya adalah memompa minyak tersebut sampai ke permukaan bumi. Minyak mentah yang keluar kemudian diolah dengan cara penyulingan untuk menghasilkan minyak bumi dengan varian-varian tertentu. Karena proses produksinya yang rumit dan tidak semua negara memiliki sumber-sumber minyak bumi maka minyak bumi menjadi barang yang sangat berharga. Apalagi, hampir semua manusia sudah sangat tergantung kepada minyak bumi. Mobilitas manusia modern sangat tergantung pada minyak bumi karena sebagian besar moda transportasi hanya bisa bergerak jika tersedia bahan bakar minyak bumi.

Karena sifatnya yang sangat spesifik dan menjadi tumpuan bagi hampir semua penduduk bumi, maka pengelolaan minyak bumi juga melibatkan kebijakan politik tingkat tinggi. Tidak jarang negara harus bertikai dengan negara lain karena berebut sumber-sumber minyak

bumi. Kondisi perminyakan Indonesia pada tahun 1950an sampai 1960an juga sangat dipengaruhi oleh tiga aspek mendasar: produksi, distribusi, dan kebijakan politik atas perminyakan. Jika salah satu dari tiga hal tersebut timpang, maka kondisi bisnis perminyakan juga akan bergejolak. Hal tersebut tergambar jelas pada kondisi perminyakan di Indonesia pada tahun 1950an, sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

PRODUKSI DAN DISTRIBUSI MINYAK BUMI INDONESIA

Kondisi perminyakan di Indonesia sangat tergantung pada cara pengelolaan, baik pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakannya, maupun pengelolaan dari pihak perusahaan asing yang menyangkut aspek produksi dan distribusi. Hal lain yang sangat berpengaruh adalah kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada kondisi pasaran minyak nasional.

Berdasarkan standar dunia, daerah minyak Indonesia merupakan daerah yang produktif dan menguntungkan. Sebagian besar produksi minyak Indonesia berasal dari sumur dengan kedalaman kurang dari 3.000 kaki, dan banyak lapangan kecil yang sudah menghasilkan pada kedalaman 1.000-2.000 kaki.¹ Sebagian besar cekungan-cekungan sedimen yang mengandung minyak berada di daerah hutan yang terpencil, sehingga menyebabkan biaya yang sangat mahal untuk memulai penyelidikan dan pengembangan daerah tersebut. Sumber-sumber minyak sebagian adalah sumur-sumur tua dengan produksi yang sudah mulai menurun. Misalnya, di Sumatera Selatan yang menghasilkan hampir seperlima dari produksi minyak mentah Indonesia, ada 20 lapangan yang beroperasi dengan jumlah pengeboran hampir 1.000 sumur yang terpencar di daerah seluas 16.000 mil persegi. Namun demikian, ada sejumlah lapangan baru

¹ W.E. Pratt dan D. Goo (ed), *World geography of Petroleum*, (Princeton: Princeton University Press, 1950).



Gambar 12.

Menara pengeboran minyak di Cepu 1926.
(Sumber: <http://collectie.tropenmuseum.nl>, 2017)

yang cukup produktif yang memberikan Indonesia suatu kedudukan yang berarti dalam produksi minyak dunia.²

Produktivitas rata-rata per sumur per tahun adalah 10.000 Metrik Ton. Jumlah yang tidak menonjol bila dibandingkan dengan negara penghasil minyak lainnya, seperti Venezuela (16.000 Metrik Ton), Sahara (33.000 Metrik Ton), atau Libya Tengah seperti Irak, Iran, Arabia, dan Kuwait (168.000 Metrik Ton), tetapi jauh lebih tinggi dari produsen besar, seperti Rusia (2.300 Metrik Ton) dan Amerika Serikat (hanya 600 Metrik Ton).³

Produksi minyak mentah naik dengan pesat dalam tahun-tahun sesudah perang karena rehabilitasi atas sumur-sumur yang rusak secara intensif, membuktikan beberapa potensi daerah minyak

² Alex Hunter, *Industri Perminyakan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Raya, 1974), hlm. 29.

³ *Ibid.*, hlm 29.

Tabel 2. Komposisi produksi minyak bumi di Indonesia 1925–1963

Perusahaan	1925	1938	1957	1963
Shell	95 %	82 %	23	26 %
NIAM	-	-	10 %	3 %
Stanvac	5 %	28 %	20 %	11 %
Caltex	-	-	47 %	55 %

Sumber: Basundoro (1996)

Indonesia. Sesudah masa-masa rehabilitasi tahun-tahun 1950-an di lapangan-lapangan lama di Sumatera Selatan dan Kalimantan, produksi minyak mentah naik sebesar 6.816.000 Metrik Ton di tahun 1950, menjadi 22.860.000 Metrik Ton di tahun 1963. Selama tahun 1950-1954, *Shell* dengan anak perusahaannya, NIAM, merupakan produsen paling besar yang menghasilkan kira-kira 5.000.000 Metrik Ton dalam satu tahun. *Shell* yang beroperasi sendiri menderita penurunan produksi dalam tahun 1955-1956 dan sesudah tahun 1960 tidak dapat mencapai lebih dari 5.000.000 Metrik Ton. *Stanvac* menghasilkan hanya sedikit, lebih dari 3.000.000 Metrik Ton di tahun 1951, tetapi produksi menurun untuk beberapa tahun karena sebagian dari lapangan-lapangan Sumatera Selatan habis masa konsesinya, dan baru tahun 1955 mencapai tingkat produksi seperti biasanya.

Pada tahun 1958 ketika *Caltex* selesai membangun terminal samudaranya di Dumai, *Caltex* menghasilkan 7.318.000 Metrik Ton dalam satu tahun, atau 47% dari seluruh produksi minyak di Indonesia. Dengan demikian, lapangan-lapangan Indonesia yang lama hanya sedikit mengadakan ekspansi jangka panjang, dan sebagian besar dari kenaikan produksi berasal dari lapangan-lapangan yang baru dieksploitasi dan yang ditemukan beberapa waktu sebelum perang. Untuk konsumsi minyak di dalam negeri, Indonesia hanya dilayani oleh dua perusahaan asing yaitu perusahaan yang tergabung dengan *Shell/BPM* serta perusahaan minyak *Stanvac*, karena *Caltex* hanya menghasilkan minyak mentah yang dijual ke luar negeri.



Gambar 13. Kantor *Bataafse Petroleum Maatschappij* (BPM) di Jakarta.
(Sumber: <http://colonialarchitecture.nl>, 2017)

Biaya produksi minyak mentah Indonesia, setidaknya-tidaknya di lapangan-lapangan yang baru, lebih rendah dibandingkan dengan standar internasional. Biaya yang rendah tersebut dikarenakan mutu minyak Indonesia yang relatif baik dengan kadar aspal dan kadar lilinnya yang rendah. Dua pertiga dari ongkos-ongkos minyak mentah dihabiskan di dalam eksplorasi dan pengembangan lapangan-lapangan sebelum minyak dihabiskan di dalam eksplorasi dan pengembangan lapangan-lapangan sebelum minyak menyembur dari bumi. Selebihnya adalah biaya-biaya variabel atau biaya mengekstraksi minyak mentah serta biaya angkut ke terminal. Dari perhitungan yang dibuat oleh bagian perminyakan *Chase Manhattan Bank* seperti dikutip oleh Hunter,⁴ diketahui bahwa biaya satuan untuk memelihara dan mengekspansi produksi minyak mentah selama 1952-1961, dengan mengadakan eksplorasi dan pengembangan adalah US\$ 0,78 per

⁴ *Ibid.*, hlm 34.

barel untuk daerah Timur Jauh, dengan Indonesia adalah produsen terpenting yang memiliki hasil 86%. Sejak tahun 1958 ke tahun-tahun berikutnya, angka biaya satuan turun sampai US\$ 0,51 pada tahun 1961. Dilihat dari angka-angka produksi, dapat diduga bahwa untuk masa 1958-1965, biaya satuan untuk eksplorasi dan pengembangan jauh lebih rendah dari US\$ 0,78, sedangkan harga pasaran dunia (bersih) untuk minyak mentah Indonesia sekitar US\$ 1,77.⁵ Sehingga, keuntungan ekspor minyak mentah dari lapangan-lapangan minyak di Indonesia cukup besar.

Pada umumnya dalam arti produksi fisik, produksi minyak Indonesia tetap merupakan prospek yang baik walaupun usaha eksplorasi jelas mengandung unsur-unsur ketidakpastian dan kekecewaan. Dinilai dari sudut ekonomis, hasilnya cukup menarik. Selain dari tingginya selisih keuntungan, juga tidak ada kekurangan



Gambar 14. Kawasan pertambangan minyak di Balikpapan 1918. (Sumber: <http://collectie.tropenmuseum.nl>, 2017)

⁵ *Ibid.*, hlm.35.

pasaran untuk minyak mentah Indonesia, baik untuk pasaran dalam negeri, maupun untuk pasaran luar negeri.

Indonesia merupakan pusat penyulingan minyak utama di kawasan Timur Jauh sebelum periode penjajahan Jepang.⁶ Pada masa penjajahan Jepang industri pertambangan minyak di Indonesia mengalami penurunan tajam. Sesudah tahun 1945, peranan di pasaran Timur Jauh dipegang kembali *Shell* dan *Stanvac* setelah sebelumnya, saat terjadinya Perang Dunia Kedua hasil dari Indonesia merosot dengan tajamnya. Hasil pengolahan naik dengan pesat, dari nol menjadi 7.552.000 Metrik Ton pada tahun 1950. Pemulihan hasil pengolahan minyak ke tingkat sebelum perang, ternyata lebih cepat dibandingkan dengan produksi minyak mentah yang tidak dapat menyamai tingkat sebelum perang sampai tahun 1953-1954.

Pengaktifan kembali penyulingan minyak memerlukan impor minyak mentah dari luar negeri terutama dari Serawak, pada tahun-tahun permulaan, dan kemudian dari Brunei dan Timur Tengah. Hal tersebut disebabkan kebutuhan akan pasaran di Asia Tenggara yang cenderung terus naik, sementara sumur-sumur di Indonesia tidak mampu melayani secara penuh kilang-kilang di Indonesia. *Shell* mengimpor lebih dari satu juta Metrik Ton per tahun sampai tahun 1963, supaya kilang-kilang pengolahan yang dimilikinya tetap bekerja. Produk yang dihasilkan sebagian besar berupa minyak tanah, karena kebutuhan minyak tanah jauh lebih besar di pasaran Asia Tenggara ketimbang bensin.

Beberapa faktor utama yang memengaruhi posisi industri pengolahan minyak bumi di Indonesia, antara lain, Pertama, kenaikan permintaan dalam negeri terhadap hasil-hasil pengolahan minyak bumi. Sejak tahun 1950 kenaikan permintaan rata-rata sebesar 12% per tahun. Jumlah tersebut cukup tinggi walaupun masih ada tempat-tempat lain dengan tingkat kenaikan tahunan yang jauh lebih tinggi, seperti Jepang 26%, dan Eropa Barat 14,5% per tahun.

⁶Peranan tersebut juga dipegang oleh Jepang dan Cina.

Kenaikan permintaan minyak bumi di Indonesia lebih besar dibanding angka 7,5% untuk daerah-daerah Asia lainnya; 8,5% untuk Australia, dan 7,5% per tahun untuk kenaikan rata-rata dunia. Sebab-sebab kenaikan yang tinggi ini tidak mudah dijelaskan.

Pertumbuhan penduduk Indonesia sesudah kemerdekaan kira-kira 2,2% per tahun. Pendapatan per kapita menunjukkan kenaikan yang sama dengan pertumbuhan penduduk, malah kemungkinan sedikit lebih lambat atau menurun. Dengan demikian kemakmuran bukanlah dasar untuk kenaikan pesat dalam permintaan minyak bumi di dalam negeri.⁷ Selain dari pertumbuhan normal, permintaan untuk hasil-hasil minyak misalnya disebabkan oleh pemakaian kendaraan bermotor dan mesin-mesin diesel untuk industri. Sebagian besar kenaikan permintaan adalah sebagai akibat dari perubahan-perubahan struktur tertentu di dalam perekonomian Indonesia, dan lebih dikarenakan kegagalan pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan fiskal, moneter, dan politik harga untuk perusahaan yang melayani kepentingan umum (*public utility*) yang realistis.

Faktor kedua yang memengaruhi industri pengelolaan minyak adalah politik harga. Sejak tahun 1945 semua harga-harga untuk hasil pengolahan minyak berada di bawah kontrol yang ketat dari pemerintah. Walaupun indeks harga kebutuhan pokok yang dibuat secara resmi oleh Biro Pusat Statistik telah melonjak sampai 61.400 dalam Bulan Februari 1965 (1954=100), namun harga-harga bensin, minyak tanah, dan hasil-hasil minyak lainnya tidak beranjak dari harga di tahun 1950. Walaupun terjadi pergeseran harga yang berarti, tetapi tidak akan menyebabkan perubahan-perubahan di dalam jumlah yang diminta ketika pergeseran harga itu lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis dan taraf aktivitas ekonomi pada umumnya.

Harga resmi minyak bumi di Indonesia telah dipertahankan pada tingkat yang demikian rendah. Harga yang sangat rendah

⁷ Biro Pusat Statistik, *Statistik Konjunktur 1958-1965*, (Jakarta: Biro Pusat Statistik, 1965)

5

Minyak Bumi di Pasaran Dalam Negeri

Pada 1958 telah terjadi sebuah gejala melonjaknya harga-harga minyak serta terlihat gejala lenyapnya minyak di pasaran pada saat-saat tertentu. Hal tersebut disinyalir berkaitan erat dengan kondisi produksi, distribusi, serta kebijakan pemerintah, baik kebijakan umum mengenai perekonomian maupun kebijakan khusus yang berkenaan langsung dengan masalah perminyakan selama tahun 1950-an. Kondisi semacam itu terus berlangsung pada tahun-tahun selanjutnya. Dua buah gejala yang dalam sistem pasar merupakan dua sisi mata uang, ketika jumlah barang yang ditawarkan sedikit maka harga akan melonjak naik. Gejala ini merupakan akibat terakumulasinya berbagai persoalan yang bermuara menjadi satu permasalahan harga yang menyulitkan konsumen. Kondisi di lapangan menunjukkan kenaikan harga yang tidak realistis dan gejala antrean panjang kendaraan bermotor di berbagai pompa bensin, baik di Jawa maupun luar Jawa. Beberapa contoh menyebutkan, di Yogyakarta dan Semarang akhir 1958 minyak tanah yang tadinya tiap botol bir berharga Rp 0,80, melonjak menjadi Rp 1 sampai Rp 1,25.¹ Padahal harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat pada waktu itu adalah Rp 0,75 tiap liter dan Rp 16 tiap kaleng berisi 18 liter. Untuk mendapatkan minyak tanah juga dilakukan sistem jatah,

¹ *Kedaulatan Rakjat*, 1 Oktober 1958.

tiap orang dijatah 2 liter, sedang pegawai negeri mendapat bagian 15 liter per bulan.

Di luar Jawa terjadi lonjakan harga yang sangat tidak realistis. Di Flores satu drum bensin isi 1.000 liter mencapai harga Rp 4.000, sedang di Manado mencapai harga Rp 6.000. Di Kupang harga bensin Rp 6,50 per liter.² Sebuah lonjakan harga yang sangat tidak realistis bila dibandingkan dengan harga resmi yang disetujui oleh pemerintah.

Sejak 1958 semua perusahaan melaporkan kepada pemerintah bahwa mereka telah mengalami kerugian penjualan di pasaran dalam negeri. Nota *Stanvac*, misalnya, menunjukkan perincian biaya-biaya produksi, ongkos angkutan laut, biaya-biaya administrasi, penyimpangan cukai serta pajak penjualan, dan sebagainya, yang mengungkapkan bahwa harga pokok bensin dan minyak tanah masing-masing Rp 0,56 dan Rp 0,55 per liter lebih tinggi dari harga kontrol yang boleh dikenakan perusahaan. Kerugian total dalam 1958 bagi perusahaan tersebut atas semua hasil-hasil kilang dilaporkan sebesar Rp 529 juta. Pada kurs yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan minyak pada waktu itu, kerugian yang dialami *Stanvac* kira-kira US \$ 17.³

Dari 1962 sampai 1965, harga eceran di Jakarta, Medan, dan Surabaya adalah Rp 4 untuk bensin dan Rp 1,50 untuk minyak tanah. Melonjaknya harga minyak di pasaran tentu saja tidak lepas dari beberapa faktor yang terakumulasi menjadi satu. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagaimana uraian berikut.

ASPEK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

Pada tahun 1950an untuk kepentingan konsumsi minyak di dalam negeri, Indonesia hanya dilayani oleh dua perusahaan yaitu *Shell* dan *Stanvac*. *Caltex* pada waktu itu hanya mengusahakan

² *Penabur*, November 1958.

³ Alex Hunter, *Industri Perminyakan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Raya, 1974), hlm. 48.

minyak tanah yang dijual ke luar negeri. Pengembangan dan kenaikan hasil-hasil dari produksi minyak tentu saja sangat dipengaruhi oleh banyaknya sumur serta konsesi-konsesi baru yang mungkin untuk dikembangkan.

Kondisi di luar negeri cukup berbeda, karena perusahaan minyak diberi kebebasan untuk mengembangkan wilayah-wilayah pertambangan untuk dieksplorasi. Sejak keluar mosi Mohammad Hasan di parlemen pada 1951, Pemerintah Indonesia cenderung mengambil poin yang kedua dari mosi tersebut, yaitu menunda memberi izin konsesi baru atau perpanjangan konsesi yang sudah habis masa berlakunya sambil menunggu undang-undang perminyakan baru, yang ternyata baru keluar tahun 1960. Undang-undang baru tersebut pun tidak langsung bisa dilaksanakan, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pelaksanaannya.

Produksi minyak mentah naik dengan pesat dalam tahun-tahun sesudah perang yang membuktikan beberapa potensi daerah minyak Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari produksi beberapa perusahaan minyak asing seperti yang telah diungkapkan di depan. Namun demikian, *Stanvac* yang melayani penjualan di dalam negeri justru mengalami penurunan produksi setelah tahun 1951.

Tabel 5. Perincian minyak mentah dan hasil olahan menurut perusahaan (dalam ribuan metrik ton).

Perusahaan	Mentah Minyak Produksi	Hasil-hasil Kilang				Ekspor		Minyak Disediakan Untuk Pasar Domestik
		Lapangan Sendiri	Perusahaan Lain	Minyak Mentah Impor	Total	Minyak Mentah	Hasil- hasil Minyak	
Caltex	11.534	-	-	-	-	10.755	-	506
Shell	5.351	5.351	472	1.415	7.138	-	2.591	1.881
Stanvac	3.327	2.637	807	-	3.444	529	1.423	1.246
Permina	1.173	-	-	-	-	995	-	-
Pertamin	761	-	-	-	-	-	-	420
Permigan	129	129	-	-	-	123	-	123
Total	22.275	8.111	1.279	1.415	10.805	12.297	4.176	4.013

Sumber: Hunter (1974)

Stanvac menghasilkan 3.000.000an metrik ton di tahun 1951, tetapi produksi menurun untuk beberapa tahun karena beberapa lapangan minyak di Sumatera Selatan habis masa konsesinya, dan perpanjangan konsesi dihambat oleh pemerintah. Pada tahun 1959 juga dikeluarkan peraturan pembatalan beberapa daerah konsesi. Walaupun sebenarnya yang dibatalkan konsesinya adalah sumur-sumur yang tidak digarap, tetapi sumur-sumur tersebut masih mempunyai potensi untuk dikembangkan. *Stanvac* sangat dipengaruhi oleh larangan eksplorasi baru. Mereka mempunyai 1,8 juta *are* konsesi jangka panjang yang berasal dari zaman sebelum perang untuk dikembangkan. Jumlah tersebut kira-kira 10 % dari semua daerah konsesi jangka panjang Indonesia. Area konsesi yang dimiliki oleh *Stanvac* kebanyakan terletak di cekungan Sumatera Selatan yang sudah banyak dieksploitasi. Produksi dari kawasan tersebut dan dari daerah baru di kawasan Lirik Sumatera Tengah, pada 1958 diharapkan mencukupi untuk bahan mentah yang akan diolah di kilang Sungai Gerong. Perusahaan tersebut harus berjaga-jaga menghadapi kemungkinan bahwa tahun 1960-an akan terjadi kekurangan minyak mentah dari lapangannya sendiri untuk menjalankan kilangnya dengan kapasitas penuh. Produksi *Stanvac* mencapai puncaknya sebesar 4.602.000 Metrik Ton di tahun 1959, dan turun menjadi 2.637.000 Metrik Ton, dengan 807.000 Metrik Ton disediakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang hanya cukup untuk mempertahankan kilang pada kapasitasnya serta hanya tersisa sedikit untuk diekspor.⁴

Shell mempunyai daerah yang luas, tetapi sebagian dari daerahnya dimiliki bersama dengan NIAM, dan kemudian jatuh ke tangan Permindo pada 1959. Banyak konsesi *Shell* misalnya di Kalimantan Timur, Tarakan, dan Jawa Timur hampir kehabisan minyak yang dapat dipompa. Pengembangan lapangan Lirik yang mencapai produksi penuh di tahun 1958 banyak membantu

⁴ *Ibid.*

memenuhi kebutuhan, tetapi pada tahun 1960 sumur ini hanya memproduksi 3.300.000 Metrik Ton dan sampai tahun 1963 hasil produksi tidak pernah melampaui angka tersebut. *Caltex* merupakan pemegang konsesi dari lapangan-lapangan Duri dan Minas yang baru saja ditemukan dari masa pengembangan. Minas mulai menghasilkan pada tahun 1962 dengan hasil yang lebih rendah dari Duri. Pada tahun 1958, ketika *Caltex* selesai membangun terminal samudranya di Dumai, dari kedua lapangan tersebut, perusahaan ini menghasilkan 7.318.000 Metrik Ton per tahun atau 45% dari produksi Indonesia, tetapi *Caltex* tidak mengolah produksinya untuk konsumsi dalam negeri, melainkan mengeksport seluruh minyak mentah yang dihasilkan ke luar negeri. Tindakan *Caltex* ini merupakan kebijakan yang dilaksanakan sejak awal ketika *Caltex* baru ikut mengelola minyak di Indonesia. *Caltex* menyerahkan seluruh kebijakan perdagangan di dalam negeri kepada *Stanvac* dan *Shell*. *Caltex* cenderung tidak mentaati kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan pemerintah. Sekalipun pendirian sebuah kilang minyak secara periodik dibicarakan dengan pihak pemerintah, tetapi *Caltex* tidak mendirikan kilang di dalam negeri dan lebih suka membatasi kegiatannya di bidang eksplorasi dan eksploitasi seluruh hasil minyak mentah untuk dijual ke pasaran luar negeri. Dengan demikian lapangan-lapangan yang memberikan kenaikan produksi adalah lapangan-lapangan yang baru dieksploitasi dan yang diketemukan beberapa waktu sebelum perang.

Sejak tahun 1963, eksplorasi dan pengembangan baru belum mendorong pertumbuhan pertambangan minyak di Indonesia. Pada tahun 1964, *Shell* mengebor 8 sumur terutama sumur-sumur yang dalam di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Tiga diantaranya kering. *Stanvac* mengebor 14 sumur di Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, tiga diantaranya juga kering. Permina, melalui kontraktornya Asamera, telah mengebor 13 sumur, enam di antaranya kering dan dua menghasilkan gas. *Pan America* yang merupakan kontraktor Permina di Sumatera Tengah mengebor 8 sumur, tidak satupun yang

mengeluarkan minyak. Pada tahun 1965, Asamera dilaporkan telah membuat tiga penemuan yang memberi harapan di Sumatera Utara. *Shell* membuat dua penemuan, satu di Sumatera Selatan dan satu di Kalimantan, sedangkan *Pan America* setelah mengeluarkan lebih dari US \$ 24 juta antara 1962 sampai 1965, dengan sia-sia tidak pernah memperoleh nasib baik dan akhirnya mengundurkan diri. Sementara itu *Caltex* pada tahun 1964, mengebor tiga sumur pengembangan dan dua sumur baru yang cukup menjanjikan. Produksi dari lapangan-lapangan Duri dan Minas naik masing-masing 23% dan 15% pada tahun 1964. Kenaikan-kenaikan produksi *Caltex* ini sebagian besar diikuti dengan berkurangnya produksi perusahaan lain, sehingga total produksi Indonesia sebenarnya hanya naik dua atau tiga persen per tahun.⁵

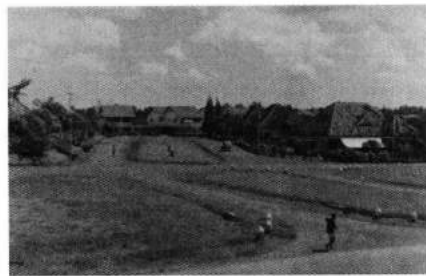
Seandainya Tiga Besar Internasional, lebih-lebih *Shell* dan *Stanvac*, diberi kebebasan untuk mengadakan eksplorasi dan mengembangkan daerah-daerah baru dalam kurun waktu 1950-1963, serta tidak dibatasi pada daerah-daerah konsesi sebelum perang, maka produksi minyak diperkirakan akan jauh lebih besar. *Shell* dan *Stanvac* tentunya akan dengan mudah melipatgandakan produksi mereka. Harga yang harus dibayarkan untuk sebuah kewaspadaan revolusioner cukup besar dalam kasus perminyakan Indonesia.

Selain persoalan produksi, kondisi perminyakan di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh faktor distribusi. Kelancaran distribusi minyak bumi tentu saja sangat tergantung dari sarana distribusi yang digunakan. Semakin baik pendukung sarana distribusi, akan semakin lancar minyak sampai ke tangan konsumen. Buruknya alat distribusi akan memperlambat penyampaian barang ke tangan konsumen. Ketika konsumen menerima keterlambatan, maka konsumen sudah dalam kondisi “haus” barang. Distribusi produk-produk minyak Indonesia hampir 60% dikuasai oleh *Shell*, dan 40% oleh *Stanvac*,

⁵ Alex Hunter, “The Oil Industry: The 1963 Agreement and After,” dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Nomor. 2, September 1965. Produksi *Shell* jatuh sebesar 14 % antara tahun 1963-1964, *Stanvac* sebesar 19 %, *Permina* 8 %, *Pertamin* 14 %, dan *Permigan* 11 %.

sedangkan perusahaan Indonesia hanya mendistribusikan dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua perusahaan minyak asing tersebut merupakan pemilik pompa-pompa bensin yang menyewakannya kepada penyalur bebas.

Agen minyak mempunyai peranan yang sangat penting dalam mata rantai pemasaran minyak. Pengawasan perusahaan-perusahaan minyak terhadap pendistribusian minyak terbatas hanya sampai tempat-tempat penyimpanan di pelabuhan atau *depot* kereta api, sehingga para agen merupakan golongan pedagang bebas, tidak terikat pada siapapun. Pada umumnya, mereka memperoleh selisih keuntungan sebesar 10-15% dari harga eceran minyak. Para agen bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sehingga mereka bisa menjual minyak yang diambil dari penyimpanan atau depot milik perusahaan minyak ke daerah lain. Perbedaan-perbedaan harga secara geografis yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Muda Perdagangan Tahun 1959, dan perbedaan-perbedaan dalam ongkos distribusi riil telah mengakibatkan penawaran minyak relatif tidak merata di berbagai daerah di Indonesia. Apalagi, perbedaan harga minyak resmi tidak berdasarkan kekuatan pasar bebas melainkan didasarkan pada kalkulasi dan penetapan dari pemerintah yang sangat tidak fleksibel.



Gambar 19. Perumahan dinas staf *Shell* di Kebayoran Jakarta 1955. (Sumber: <http://colonialarchitecture.nl>, 2017)

Kebijakan pemerintah untuk menyalurkan minyak tanah melalui toko-toko sandang pangan dan koperasi juga mempersulit distribusi.⁶ Selain keuntungan yang diperoleh terlalu kecil dibandingkan dengan pengeluaran, pedagang-pedagang tersebut sering tidak mampu menyediakan alat-alat distribusi yang diperlukan untuk penjualan eceran. Jumlah minyak tanah yang harus dibeli juga terlalu banyak untuk ukuran mereka, sehingga kapasitas alat-alat distribusi tidak dapat menampung. Jika mereka tidak mampu menjual habis minyak tanah yang telah diperoleh, mereka bisa mengembalikan minyak tanah tersebut ke perusahaan.

Dalam kondisi yang serba kacau, perusahaan-perusahaan internasional tidak bersedia menanam modal untuk fasilitas-fasilitas distribusi. Penambahan mobil-mobil tangki, gerbong-gerbong minyak, tangki-tangki penyimpanan, dan bahkan peralatan pelabuhan terminal tidak mencukupi untuk melayani kenaikan permintaan dalam negeri. Jumlah pompa-pompa bensin yang tersedia tidak mencukupi untuk melayani jumlah kendaraan yang terus bertambah. Di samping masalah fasilitas, masalah kontrol harga yang sangat ketat yang dilakukan oleh pemerintah juga memengaruhi distribusi minyak di dalam negeri. Dengan kontrol harga yang ketat, mekanisme pasar tidak terjadi. Harga telah dikendalikan sepanjang menyangkut perusahaan-perusahaan minyak, sehingga hanya terjadi dua kali perubahan. Pertama, dalam masa 1950-1954, harga borongan bensin dan minyak tanah di terminal masing-masing Rp 1,37 dan Rp 0,53 per liter. Harga tersebut sudah termasuk cukai dan pajak penjualan yang dipungut perusahaan untuk pemerintah. Dengan harga sebesar

⁶ Untuk masalah pendistribusian pada toko Sandang Pangan dan Koperasi lihat tulisan Wanda Mulia, "Proses-proses Perubahan dalam Struktur Perdagangan Sedjak Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin," dalam *Ekonomi Keuangan Indonesia* Tahun ke XII No. 11/12 (November/Desember) 1960. Dalam artikel itu disebutkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M mengenai penghentian usaha-usaha perdagangan eceran bangsa asing yang berkedudukan di luar ibu kota kabupaten/karesidenan/kotapraja/provinsi dengan batas waktu bekerja sampai tanggal 31 Desember 1959, sedangkan tempat-tempat yang lowong tersebut diprioritaskan untuk koperasi, toko-toko pedagang menengah Indonesia, toko-toko pengusaha nasional lainnya, dan perseroan warga negara Indonesia.

6

Penutup: Masa Lalu untuk Hari Ini dan Masa Depan

Ketika naskah buku ini sedang dalam proses penyelesaian, bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi perusahaan asing dalam bidang pertambangan, yaitu PT. Freeport Indonesia. Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang yang berafiliasi dengan perusahaan asal Amerika Serikat, *Freeport McMoran Cooper & Gold Inc.*, yang telah lama melakukan kegiatan di Papua dengan sistem Kontrak Karya. Keberadaan PT. Freeport di Indonesia sudah sejak lama mengundang kontroversi karena lingkup pekerjaannya yang begitu besar serta terkait dengan kekayaan bangsa yang sangat strategis. Bahkan, banyak rakyat Indonesia yang mencurigai bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport tidak terbuka, karena mereka tidak melakukan pengolahan seluruh hasil tambang di Indonesia. Mereka membawa sebagian besar hasil tambang mereka dalam bentuk konsentrat ke Amerika Serikat dan mengolahnya di sana, dan hanya sebagian kecil saja yang diolah di *smelter* yang ada di Indonesia.

Hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport naik turun seiring dengan perkembangan politik di Indonesia. Pada saat-saat tertentu pemerintah memiliki keinginan kuat untuk mengambil alih aktivitas pertambangan di Papua tersebut, namun keinginan tersebut menyusut beberapa saat kemudian. Secara terbuka orang melihat bahwa bangsa Indonesia sepertinya tidak kuat menghadapi

tekanan dari PT. Freeport, serta kemungkinan besar juga tekanan dari Pemerintah Amerika Serikat, sehingga terkesan selalu mengalah. Upaya mengendalikan PT. Freeport memang bukan pekerjaan mudah karena keberadaan mereka sudah kuat mengakar di Indonesia. Salah satu cara yang paling tepat untuk mengendalikan perusahaan asing tersebut adalah dengan penguasaan saham 51 persen, namun upaya tersebut juga bukan hal mudah. Freeport McMoran Cooper & Gold Inc., sebagai pemilik saham mayoritas di PT. Freeport Indonesia tentu saja tidak mau begitu saja melepas saham (divestasi) mayoritas mereka ke Pemerintah Indonesia. Mereka tahu betul bahwa kawasan pertambangan Timika merupakan harta karun yang nyaris tak terbatas banyaknya.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk menguasai kembali kawasan tambang yang saat ini dikelola oleh PT. Freeport mirip dengan yang telah diungkap dalam bagian-bagian terdahulu pada buku ini. Pertambangan minyak bumi di Indonesia adalah aktivitas warisan kolonial. Semangat yang terkandung dalam aktivitas tersebut adalah mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan bangsa Indonesia, termasuk kekayaan tambang, untuk kepentingan penjajah atau kepentingan bangsa asing. Kepentingan bangsa Indonesia sebagai pemilik sah kawasan-kawasan tambang tersebut diabaikan, kalau pun diperhatikan hanya kecil saja terkait dengan keberadaan buruh-buruh kelas bawah. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan-perusahaan tambang minyak asing tetap menguasai kawasan pertambangan minyak dengan regulasi yang sama dengan yang diberlakukan pada masa kolonial. Akibatnya, kerugian bangsa yang telah merdeka ini terus berlanjut. Bangsa Indonesia yang telah merdeka, yang seharusnya sudah bisa sepenuhnya menikmati kekayaan alam yang berlimpah-ruah, pada akhirnya harus gigit jari karena sebagian besar kekayaan tambangnya masih dikuasai dan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing.

Beruntung Pemerintah Indonesia dengan dukungan sepenuhnya dari rakyat segera menyadari bahwa pola-pola pengelolaan

pertambangan minyak bumi sangat merugikan bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan semangat nasionalisme yang tinggi sebagai bangsa yang baru saja merdeka, upaya mendobrak sistem kolonial yang masih diterapkan pada pengelolaan pertambangan minyak pun dilakukan. Isu nasionalisme menjadi isu utama atas upaya tersebut. Regulasi kolonial diubah dengan regulasi nasional dibarengi dengan negosiasi-negosiasi tiada henti. Perjuangan pada tahun 1950-1960an telah melahirkan perusahaan minyak nasional sekaligus melahirkan pola baru pengelolaan tambang minyak yang terkait dengan perusahaan tambang minyak asing. Pola baru tersebut adalah sistem Kontrak Karya yang intinya bahwa pertambangan dan gas bumi hanya diusahakan oleh Negara, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Perusahaan Negara. Ada pun posisi perusahaan-perusahaan minyak asing adalah sebagai perusahaan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan milik Perusahaan Negara. Konsekuensi atas perubahan regulasi tersebut, sistem pembagian keuntungan atas hasil tambang ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan tambang minyak asing.

Keberhasilan Pemerintah Indonesia untuk memaksa perusahaan-perusahaan tambang minyak asing agar tunduk pada ketentuan perundang-undangan bangsa Indonesia tidak lain karena semangat nasionalisme yang berkobar-kobar dari seluruh elemen bangsa. Tanpa semangat nasionalisme yang tinggi tentu sulit menghadapi perusahaan-perusahaan asing tersebut. Mereka cenderung memaksakan kehendak untuk tetap bertahan pada mekanisme-mekanisme yang lebih menguntungkan mereka dan merugikan bangsa Indonesia. Tidak jarang mereka menggunakan kekuatan politik untuk menekan Pemerintah Indonesia agar tunduk pada kemauan mereka. Pemerintah Amerika Serikat misalnya, selalu menguntit setiap perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan minyak Amerika Serikat, Caltex. Mereka tetap menghendaki agar perusahaan minyak tersebut bisa melanjutkan usahanya secara maksimal di Indonesia.

Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1950-1960an dalam menghadapi perusahaan-perusahaan tambang minyak asing harus dijadikan contoh dan pijakan untuk kasus-kasus kontemporer. Bangsa Indonesia tidak boleh ragu dalam menghadapi PT. Freeport Indonesia yang akan membawa perselisihan terkait pengelolaan kawasan pertambangan Timika ke Arbitrase Internasional. Papua adalah bagian sah dari Indonesia, sehingga apa pun yang ada di Papua adalah milik bangsa Indonesia yang harus dikelola dengan sistem Indonesia. Oleh karena itu siapa pun yang melakukan usaha di Indonesia juga harus tunduk pada kemauan dan aturan bangsa Indonesia. Sudah terlalu lama perusahaan tambang asing itu mengeruk kekayaan bangsa Indonesia, dan terlalu banyak kekayaan yang telah mereka bawa dari Indonesia.

Belajar pada semangat para pendahulu kita dan para pejuang bidang pertambangan, hanya ada satu prinsip bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan bangsa. Mereka mengabaikan segala kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Prinsip semacam itu yang harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia saat ini dalam menghadapi tekanan perusahaan tambang asing, semisal PT. Freeport. Sebagai sebuah perusahaan PT. Freeport berkepentingan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, namun sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia berkewajiban menjaga martabatnya dan menjaga kekayaannya untuk masa depan bangsa ini dan untuk kemakmuran rakyatnya.

Daftar Pustaka

Arsip

- Arsip Sekretariat Negara Nst. 49/59 tentang Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1958 tentang Pengawasan dan Penjaluran Pengusahaan Minjak Bumi.
- Arsip Sekretariat Negara Sts. 2142/7/64 -50 tentang Undang-Undang nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di Indonesia.
- Arsip Sekretariat Negara Sts. 2352/8/64-50 tentang Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1958 tentang Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda.
- Arsip Sekretariat Negara Sts. 160/1/65 -50 tentang Undang-Undang nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan.
- Arsip Dep. Penerangan nomor U.P./220 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minjak dan Gas Bumi.
- Arsip Nasional nomor 585/MK tentang Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada N.V. Stanvac.

Koran dan Majalah

- Dian Madjalah Industri No. 4-Tahun Ke V, 1957*
- Keng Po, 30 Oktober 1957*
- Kedaulatan Rakjat, 1 Oktober 1958*
- Kedaulatan Rakjat, 7 Oktober 1958*
- Kedaulatan Rakjat, 12 November 1958*
- Kedaulatan Rakjat, 22 Desember 1958*
- Kedaulatan Rakjat, 25 Maret 1959*

Kedaulatan Rakjat, 1 Oktober 1959

Penabur, 10 November 1958

Warta Ekonomi Tahun Ke 13 No. 11/12, 19 Maret 1960

Financial and Economic News, 31 Desember 1965

Bulletin of Indonesian Economic Studies No. 4 (Juni) 1966

Bussines News, 22 Oktober 1965

Bussines News, 22 Januari 1996

Buku dan Artikel

Abdulgani, Ruslan. 1972. *25 Tahun Indonesia-PBB*. Jakarta: Gunung Agung

Abdullah, Taufik. 1991. Pengajaran dan Penelitian Sejarah, Relevance, Kebenaran-Faktual, Keterangan-Peristiwa. *SEJARAH*, No. 1

Ali, Fachry. ed. 1988. *Kemelut Demokrasi Liberal, Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton*. Jakarta: LP3ES.

Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi Tentang Sejarah, Pendapat Pendapat Modern Tentang Filsafat Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

Bank Indonesia. 1953. *Annual Reports 1952-1953*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 1955. *Annual Reports 1954-1955*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 1957. *Annual Reports 1956-1957*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 1959. *Annual Reports 1958-1959*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bartlett, Anderson G. et al. 1986. *Pertamina, Perusahaan Minyak Nasional*. Jakarta: Inti Idayu Press

Basundoro, Purnawan. 1996. Implikasi Berbagai Kebijakan terhadap Kondisi Perminyakan Indonesia Tahun 1945-1965. *Skripsi*, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada

Bee, Ooi Jin. 1982. *The Petroleum Resource of Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Biro Perantjang Negara. 1956. Pendjelasan atas Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, vol IX, no. 10.

Biro Pusat Statistik. 1965. *Statistik Konjunktur 1958-1965*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.

Booth, Anne, et al. ed. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Castles, Lance. 1965. Socialism and Private Bussines The Latest Phase. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, no. 1.

- Central Statistical Bureau. 1963. *Statistical Pocket book of Indonesia 1963*. Jakarta: Central Statistical Bureau.
- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dhakidae, Daniel. ed. 1992. *Frans Seda Simfoni Tanpa Henti, Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Darsono, et al. 2016. *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Departemen Pertambangan dan Energi. 1985. *40 Tahun Peranan Pertambangan dan Energi Indonesia 1945-1985*. Jakarta: Departemen Pertambangan dan Energi, hlm 213.
- Deppen RI. 1961. *Masalah Irian Barat di PBB, Penjataan-penjataan Menteri Luar Negeri RI dan Ketua Delegasi RI Dr. Subandrio di Madjelis Umum Ke XVI PBB*. Jakarta: Deppen RI.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1957. *Ekonomi Pembangunan*. Djakarta: Penerbit Pembangunan.
- Dumairy. 1987. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: PAU-FE UGM.
- Effendi, Jullie. 1952. *Irian Barat*. Jakarta: Noordhoff Kolf N. V., hlm 44-45.
- Ensiklopedi Ekonomi. 1992. *Bisnis, dan Manajemen Jilid 2*. Jakarta: Cipta Adi Sarana Pustaka.
- Feith, Herbert. 1995. *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Feith, Herbert. dan Lance Castles. ed. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, hlm. 46.
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto. ed. 1982. *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- Gerretson, F.C. 1957. *History of The Royal Dutch*. Leiden: E.J. Brill.
- Glassburner, Bruce. ed. 1971. *The Economy of Indonesia, Selected Reading*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Yogyakarta: UI Press.
- Harvey, Barbara Sillars. 1984. *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti Press.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Kahar Muzakkar, Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Hasan, Teuku Mohammad. 1985. *Sejarah Perjuangan Perminyakan Indonesia*. Jakarta: Sari Pinang Sakti.

- Higgins, Benjamin dan Jean Higgins. 1963. *Indonesia The Crisis of The Millstones*. Canada: D. van Nostrand Company Inc.
- Hill, Hal. 1990. *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Humas Pertamina. 1982. *25 Tahun Pertamina 1957-1982*. Jakarta: Humas Pertamina.
- Humas Pertamina. 1985. *40 Tahun Perkembangan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 1945-1985*. Jakarta: Humas Pertamina.
- Hunter, Alex. 1965. The Oil Industry: The 1963 Agreement and After. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, no. 2.
- Hunter, Alex. 1974. *Industri Perminyakan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Raya.
- Ibrahim, Alfian. et al. 1984. *Bunga Rampai Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Javasche Bank. 1952. *Laporan Tahunan Javasche Bank 1951-1952*. Jakarta: Javasche Bank.
- Johannes, Herman. 1979. Indonesia Di Sekitar Masalah Energi. *PRISMA*, no. 11
- Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Karma, Mara. 2001. *Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi: Sebagai Dokter, Tentara, Pejuang Minyak Bumi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kartodirdjo, Sartono. 1989. *Ungkapan Ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur*. Jakarta: Gramedia.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat, ed. 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Laifer, Michael. 1986. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Leirissa, R.Z. 1991. *PRRI-Permesta, Strategi Membangun Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Lubis, Todung Mulya dan Buxbaum, R.M, ed. 1986. *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mackie, Jamie. 1967. *Problems of Indonesia Inflation*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

- Mas'ood, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Muhaimin, Yahya A. 1990. *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES.
- Mulia, Wanda. 1960. Proses-proses Perubahan dalam Struktur Perdagangan Sedjak Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, vol XII, No. 11.
- Mulia, Wanda. 1961. Distribusi Minjak Tanah Pada Waktu Sekarang. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Volume XVI, No. 3.
- Nasution, Abdul Haris. 1985. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama*. Jakarta: Masagung.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Noer, Deliar. 1990. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Noreng, Qystein. 1983. *Minyak Dalam Politik, Upaya Mencapai Konsensus Internasional*. Jakarta: Rajawali.
- Pertamina Public Relation and Foreign Affairs. 1990. *History and Development of Oil Industry in Indonesia*. Jakarta: PPR
- PN Pertamina. 1971. *Minjak Bumi Indonesia, Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Indonesia*. Jakarta: PN Pertamina.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1974. *Peranan Ibnu Sutowo dalam Perminyakan Nasional*. Jakarta: Humas Pertamina.
- Pratt, W.E., and Goo, D, ed. 1950. *World Geography of Petroleum*. Princeton: Princeton University Press.
- Priyono, A.E. dan A.O. Saleh, ed. 1984. *Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PLP2M.
- Purwanto, Bambang. 1992. Pertanian Rakyat, Sumber Ekonomi Penting yang Sering Dilupakan dalam Penulisan Sejarah Indonesia. *HISTMA*, vol. I, no. 2.
- Purwoko, Dwi. 1995. *Dr. Mr. Th. Moehammad Hasan Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Rahardjo, M. Dawam. 1986. Pendekatan Historis Stuktural, Menentukan Format Pembangunan. *PRISMA*, no. 10.
- Rahardjo, M. Dawam. 1992. *Pragmatisme dan Utopia, Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ramadhan KH. 1990. *Ladang Perminus*. Jakarta: Pustaka Jaya Grafiti.
- Ramadhan KH. 2008. *Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bercerita!*. Jakarta: NPCI

- Robinson, Richard. 1984. *Sejarah Politik Orde Baru*. Jakarta: LSI
- Sadli, Mohammad. 1988. *Pembangunan Ekonomi dalam Prespektif Sejarah. Teknologi dan Strategi Militer*, 11 Maret
- Sanusi, Ahmad. 1958. *Perkembangan Sistem Pemerintahan RI 1945-1958*. Bandung: Penerbit Universitas.
- Seda, Frans. 1959. *Bensin. Penabur*, 6 Djanuari.
- Soedjatmoko, ed. 1954. *An Introduction to Indonesian Historiography*. Ithaca: Cornell University Press.
- Soekarno. 1965. *Di Bawah Revolusi Djilid I*. Djakarta: Panitia Penerbit DBR
- Sulistiyono. 1988. *Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di Indonesia 1957-1960. Skripsi*, Sarjana Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada
- Sumaryono, E. 1993. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sundhaussen, Ulf. 1980. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES
- Surat Keputusan Menteri Muda Perdagangan nomor 843 Tanggal 30 Desember 1959 tentang Harga Minyak
- Sutter, John Orval. 1959. *Indonesianisasi: A Historical Survey of The Role of Politics in The Institutions Of A Changing Economy from The Second World War to The Eve of General Elections 1940-1955. PhD Dissertation*, Cornell University.
- Von Faber, G.H. 1934 *Nieuw Soerabaia: de geschiedenis van Indië's voornaamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling 1906-1931*. Surabaya: Van Ingen.
- Wardani, Restu. 1993. *Sejarah Buruh Perminyakan Nasional di Indonesia 1948-1980. Skripsi*, Sarjana Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Wijaya, Albert. 1988. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Zed, Mestika. 1991. *Kepialangan, Politik, dan Revolusi: Palembang 1990-1950. Disertasi Vrije Universiteit te Amsterdam*

Indeks

A

ABDA, 51
Aceh, 69
Adrian Stoop, 9
Aelko Zijlker, 8
AFNEI, 52
Afrika Timur, 17
Aidit, 125
Ali Sastroamijoyo, 36
Amandemen, 11, 13
Amerika Serikat, 8
Angkatan Darat, 4
Arabia, 79
Asamera, 111
Asia, 17
Asia Tenggara, 1
Australia, 17
avtur, 117

B

Barbara Sillar Harvey, 44
Batalyon Minyak, 54
Batu bara, 118
Belanda, 7, 8
bensin, 114, 117
Bitung, 31
BP, 19
BPM, 11, 53
Brunei, 83
Bukit Barisan, 30
buruh, 118

C

Caltex, 18
Cepu, 9, 79
Chase Manhantan Bank, 81

Cibodas, 8
Cina, 23
cukai, 13

D

Daud Bereuh, 69
de Gelder, 9
De Javasche Bank, 27
Den Haag, 14
deposito, 27
devisa, 3, 5
diesel, 121
Diponegoro, 32
distribusi, 5, 6, 112
domestik, 20
Dumai, 80
Duri, 111

E

Edwin Drake, 8
ekonometrik, 2
eksplorasi, 5, 81
ETMSU, 69

F

fasis, 23
Filipina, 86
Financial Arrangement, 57
Flores, 108
Freeport, 129

G

General Leasing Act, 14
gulden, 27
Gulf, 19
Gunting Sjafruddin, 27

H

Hal Hill, 37
 Hindia Belanda, 8
 HINDIA BELANDA, 8
 historiografi, 1
 Hunter, 81

I

Ibnu Sutowo, 68
 IMW, 10
 Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 inflasi, 5
 Inggris, 9
 Irak, 79
 Iran, 79
 Irian, 20
 Irian Barat, 38

J

Jakarta, 3, 108
 Jambi, 15
 Jamie Mackie, 4
 Jan Reerink, 8
 Jawa Barat, 8
 Jawa Tengah, 9
 Jawa Timur, 9
 Jepang, 3, 49
 John Sutter, 26
 Jones, 45
 Juanda, 40

K

Kalimantan, 9
 Kalimantan Timur, 9
 Katapa, 70
 kliometrik, 2
 KMB, 35
 koloni, 7
 kolonial, 1, 7, 8
 kompor, 116
 konsesi, 14
 Kontrak Karya, 131
 Kupang, 108

L

Laskar, 53
 Ledok, 67
 Let Alone Agreement, 56
 liberal, 2, 3, 23
 Libya, 79
 Lirik, 110
 lokomotif, 119

M

Malaya, 49
 Manado, 108
 Masyumi, 26
 MBAD, 29, 32
 Medan, 108
 metodologi, 2
 Mijn Ordonantie, 73
 militer, 28
 Minas, 111
 minyak tanah, 114
 moderat, 25
 Mohammad Hatta, 26
 moneter, 120
 Morotai, 31

N

nasionalisasi, 25, 38
 Nasution, 32
 Natsir, 33
 Nglobo, 67
 NIAM, 15, 42
 NICA, 55
 NKPM, 13, 53
 NNGPM, 20
 NPPM, 18

O

obligasi, 27
 Orde Baru, 127

P

Palembang, 50
 Pan America, 111